

• Sarjan

• Agung Nugroho



Pendidikan Kewarganegaraan

Bangga Menjadi Insan Pancasila

Untuk SD/MI Kelas V



Pusat Perbukuan
Departemen Pendidikan Nasional



• Sarjan • Agung Nugroho

Pendidikan Kewarganegaraan

Bangga Menjadi Insan Pancasila

Untuk SD/MI Kelas V

TELADAN
Pelajar Kota Baru



Pusat Perbukuan
Departemen Pendidikan Nasional

5

Hak Cipta pada Departemen Pendidikan Nasional
Dilindungi Undang-undang

Pendidikan Kewarganegaraan **Bangga Menjadi Insan Pancasila 5**

Untuk Kelas V SD dan MI

Oleh:
Sarjan
Agung Nugroho

Editor:
Maryanto
Setting & Layout:
Tim

Designer Sampul & Ilustrator:
Risa Ardiyanto

Ukuran Buku: 17,6 x 25 cm

372.8

SAR

SARJAN

p

Pendidikan Kewarganegaraan 5 : Bangga Menjadi Insan Pancasila Untuk SD/MI
Kelas V / Oleh Sarjan, Agung Nugroho ; editor, Maryanto. -- Jakarta : Pusat Perbukuan,
Departemen Pendidikan Nasional, 2009.
vi, 89 hlm. : ilus. ; 25 cm.

Bibliografi : hlm. 88

ISBN 978-979-068-082-1 (no. jilid lengkap)

ISBN 978-979-068-092-0

1. Pendidikan Moral Pancasila-Studi dan Pengajaran
 2. Pendidikan Moral Pancasila-Pendidikan Dasar
- I. Judul II. Agung Nugroho III. Maryanto

Hak Cipta buku ini dibeli Departemen Pendidikan Nasional
dari Penerbit CV. Usaha Makmur

Diterbitkan oleh Pusat Perbukuan
Departemen Pendidikan Nasional
Tahun 2009

Diperbanyak oleh ...

Kata Sambutan

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya, Pemerintah, dalam hal ini, Departemen Pendidikan Nasional, pada tahun 2008, telah membeli hak cipta buku teks pelajaran ini dari penulis/penerbit untuk disebarluaskan kepada masyarakat melalui situs internet (*website*) Jaringan Pendidikan Nasional.

Buku teks pelajaran ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan telah ditetapkan sebagai buku teks pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2008 tanggal 7 November 2008.

Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para penulis/penerbit yang telah berkenan mengalihkan hak cipta karyanya kepada Departemen Pendidikan Nasional untuk digunakan secara luas oleh para siswa dan guru di seluruh Indonesia.

Buku-buku teks pelajaran yang telah dialihkan hak ciptanya kepada Departemen Pendidikan Nasional ini, dapat diunduh (*down load*), digandakan, dicetak, dialihmediakan, atau difotokopi oleh masyarakat. Namun, untuk penggandaan yang bersifat komersial harga penjualannya harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Diharapkan bahwa buku teks pelajaran ini akan lebih mudah diakses sehingga siswa dan guru di seluruh Indonesia maupun sekolah Indonesia yang berada di luar negeri dapat memanfaatkan sumber belajar ini.

Kami berharap, semua pihak dapat mendukung kebijakan ini. Kepada para siswa kami ucapkan selamat belajar dan manfaatkanlah buku ini sebaik-baiknya. Kami menyadari bahwa buku ini masih perlu ditingkatkan mutunya. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat kami harapkan.

Jakarta, Februari 2009
Kepala Pusat Perbukuan

kata pengantar

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, penulis berhasil menyusun Buku **Pendidikan Kewarganegaraan Bangsa Menjadi Insan Pancasila**.

Buku ini akan menjadi teman belajarmu, selama proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Buku ini disajikan secara menarik dan menyenangkan dengan konsep dialogis dan pendekatan pembelajaran kontekstual (*contextual teaching Learning (CTL)*). Bersama Togar, Ida, dan Atep, kamu akan diajak lebih aktif dan kreatif melakukan tanya jawab, diskusi, dan pengamatan. Dengan demikian memudahkanmu memperoleh materi dan inspirasi dari lingkungan di sekitarmu.

Namun di balik itu, kesempurnaan jauh dari kodrat manusia dan hasil-hasil karyanya. Untuk itu penulis selalu terbuka terhadap saran dan kritik dari semua kalangan. Saran dan kritik tersebut akan menjadikan buku ini sebagai media terdepan pencipta insan-insan Pancasila.

Akhirnya, selamat belajar dan semoga berhasil menjadi Insan Pancasila.

Surakarta, April 2008

Penulis

Daftar Isi

Kata Sambutan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar isi	v
Pendahuluan	1
Sahabat kita	3
BAB 1 Negara Kesatuan Republik Indonesia	
A. Pengertian Negara Kesatuan Republik Indonesia	7
B. Mengetahui Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	9
C. Pentingnya Keutuhan Negara Republik Indonesia	14
D. Perilaku Menjaga Keutuhan NKRI	17
Uji Kompetensi	19
BAB 2 Peraturan Perundang-undangan	
A. Pengertian Perundang-undangan	27
B. Pentingnya Peraturan Perundang-undangan	30
C. Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan ...	31
D. Peraturan Perundang-undangan di Pusat dan Daerah	34
Uji Kompetensi	41
Ulangan Semester 1	46
BAB 3 Memahami Kebebasan Berorganisasi	
A. Pengertian Organisasi	55
B. Organisasi di Sekolah dan Masyarakat	60
C. Peran Serta Memilih Organisasi di Sekolah	62
Uji Kompetensi	65
BAB 4 Keputusan Bersama	
A. Pengertian Keputusan	73
B. Bentuk-bentuk Keputusan Bersama	74
C. Mematuhi Keputusan Bersama	79
Uji Kompetensi	84
Ulangan Semester 2	89
Daftar Pustaka	96
Glosarium	97



Pendahuluan

Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan merupakan ilmu pengetahuan yang bertujuan membentuk diri berdasarkan ciri-ciri masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, tepat kiranya apabila buku ini dijadikan sarana penunjang pembentukan diri dan pembekalan pengetahuan kewarganegaraan.

Buku ini menjadi teman belajar yang menyenangkan untuk mewujudkan tujuan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan karena dapat merangsang siswa untuk memiliki kecakapan berpikir secara:

- **Kritis**, yaitu dengan mencermati dan menjadikan materi-materi di sekitarnya (bisa berupa ide, gagasan, pengetahuan, dan peristiwa) sebagai sumber inspirasi.
- **Rasional**, yaitu dengan mengedepankan aspek rasionalitas (akal budi dan logika) berdasarkan ilmu pengetahuan ilmiah.
- **Kreatif**, yaitu dengan mengembangkan alternatif-alternatif pemecahan masalah.

Ketiga aspek tersebut dapat terwujud dengan melibatkan peran aktif siswa untuk bertanya jawab, berdiskusi, *role playing* (bermain peran), observasi (pengamatan), dan analisis. Kesemuanya itu tersaji dalam sistematika buku yang meliputi **peta konsep, pendalaman materi, uji wawasan, praktik kerja, dan uji kompetensi**.

Di samping itu, untuk meningkatkan partisipasi aktif dan rasa tanggung jawab serta membiasakan bertindak cerdas dalam kegiatan masyarakat dan dalam menanggapi isu-isu kewarganegaraan juga disajikan **uraian materi secara tematik**. Misalnya tema “Demokrasi” yang diuraikan secara mendalam dengan membahas; kegiatan bermusyawarah, voting, dan sikap menerima kekalahan.

Akhirnya, selamat belajar. Semoga berhasil menjadi **Insan Pancasila Sejati**.

Surakarta, 2008

Penulis

Sahabat Kita

Halo, apa kabar? Wah, senang ya, kalian sudah naik kelas yang lebih tinggi lagi di sekolah kalian. Selamat ya, semoga di kelas ini kalian makin giat belajarnya. Ayo kenalan dulu dengan teman-teman kalian di kelas ini:

Halo teman-teman, namaku Togar Manurung. Nama panggilanku Togar. Aku berasal dari Sumatra Utara. Aku suka makan nasi goreng dan main sepak bola. Cita-citaku menjadi tentara.



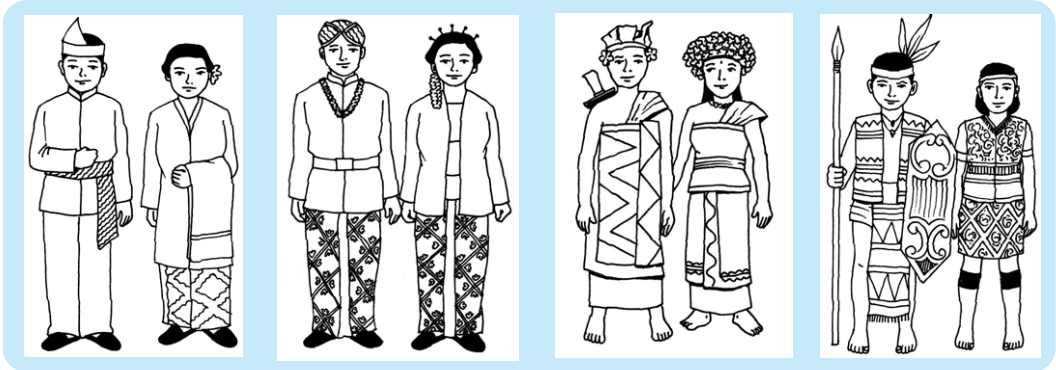
Halo, namaku Ida Ayu Lestari. Nama panggilanku Ida. Aku berasal dari Bali. Aku hobi memasak dan merangkai bunga. Cita-citaku menjadi perawat.



Halo, namaku Atep Surya Lesmana. Nama panggilanku Atep. Aku berasal dari Jawa Barat. Aku gemar bermain musik. Cita-citaku menjadi pengusaha.

Bab 1

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)



*“Tanah airku tidak kulupakan
Kan terkenang selama hidupku
Biarpun saya pergi jauh
Tidak kan hilang dari kalbu
Tanah ku yang kucintai
Engkau kuhargai
... (Ibu Sud)“*

Coba renungkan isi penggalan lagu Tanah Airku di atas.

Mengapa ketika bendera Merah Putih berkibar ada rasa bangga dan haru?

Mengapa banyak yang bercita-cita menjadi tentara?

Tahukah kalian, bahwa menjadi tentara, atau olahragawan atau apapun demi negara Indonesia adalah bukti kecintaan kita kepada negeri ini.



Tujuan Pembelajaran

Tujuan pembelajaranmu pada bab ini adalah:

- ❖ mampu mendeskripsikan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- ❖ mampu memahami arti pentingnya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- ❖ mampu menyebutkan dan menerapkan contoh-contoh perilaku menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

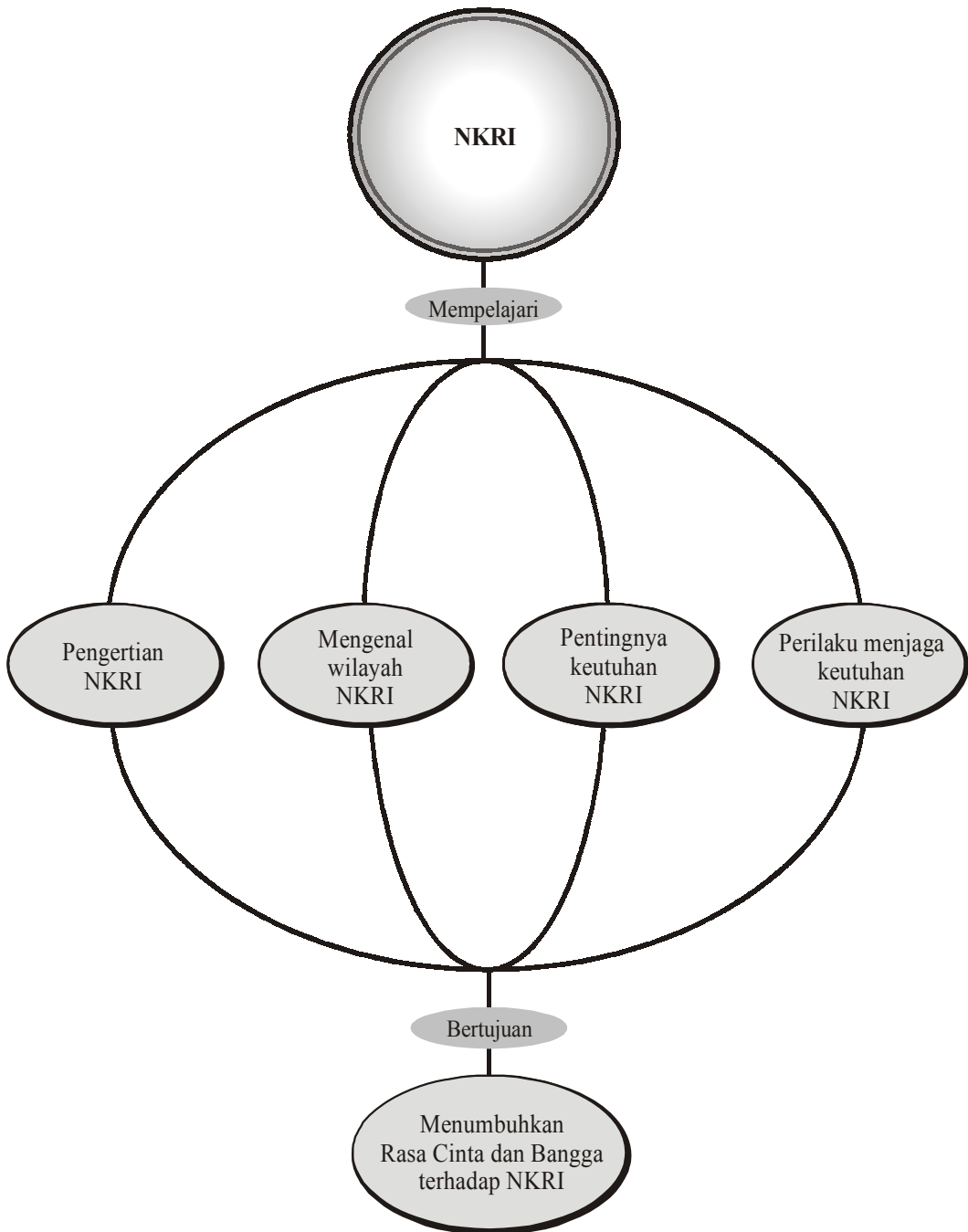


Kata Kunci

- ❖ persatuan
- ❖ kesatuan
- ❖ NKRI



Peta Konsep



A. Pengertian Negara Kesatuan Republik Indonesia

“Hu ... hu ... hu. Togar nggak mau masuk sekolah,” kata Togar sambil melempar tas sekolahnya.

“Ada apa, sayang? Anak Ibu, kok menangis?” tanya ibunya sambil mengusap kepalanya.

“Saya diejek teman-teman ... anak Belanda ... anak Belanda. Hu ... hu ... hu,” tangisnya makin seru.

“Lho, bukankah benar Togar anak Belanda? Ibu dulu kan orang Belanda. Terus apanya yang salah, sayang?” tanya ibunya lagi.

“Tapi, sekarang kan kita di Indonesia. Saya anak Indonesia,” jawab Togar dengan suara keras.

Ibu Togar membiarkan anaknya sendiri. Tak lama, beliau datang sambil membawa sebuah koran yang telah usang, namun terlihat terawat baik. Koran tersebut berisi berita pembacaan teks proklamasi kemerdekaan.

MERDEKA



Sumber: *30 Tahun Indonesia Merdeka*, 1975

Gambar 1.1 Ir. Soekarno dan Hatta membacakan naskah Proklamasi.

Proklamasi

Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

Jakarta, 17 Agustus 1945
Atas nama bangsa Indonesia

Soekarno-Hatta

“Nak, kamu harus bangga. Kakek buyut dari ayahmu juga ikut berjuang memerdekakan negeri ini,” kata ibu Togar.

“Jadi, saya keturunan pahlawan, Bu?” tanya Togar. Ibunya hanya tersenyum dan mereka saling berpelukan.

“Benar, sayang. Jangan lupa, besok kamu harus tetap sekolah. Kamu tidak boleh marah pada teman-temanmu. Kamu juga tidak boleh membalas ejekan temanmu. Kamu harus memaafkan mereka,” nasihat ibu Togar.

Togar kembali bersemangat. Keesokan harinya Togar ke sekolah.

Pak Darma sedang menjelaskan Negara Kesatuan Republik Indonesia di kelas 5.

“Anak-anak, sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, bangsa Indonesia berdiri sebagai bangsa merdeka dan berdaulat,” jelas Pak Darma.

“Jadi, proklamasi merupakan dasar bagi pembentukan negara Indonesia, Pak?” tanya Togar.

“Benar, Togar,” kata Pak Darma.

“Pak, bukankah negara kita terdiri dari banyak pulau. Lalu mengapa disebut negara kesatuan?” tanya Ida bersemangat.

“Anak-anak, siapa yang dapat membantu Ida?” tanya Pak Darma sambil menghapus papan tulis.

“Saya, Pak. Negara Kesatuan adalah negara yang merdeka dan berdaulat dan ada pemerintahan yang mengatur seluruh wilayah, seperti dalam UUD 1945,” jawab Atep bangga.

Pasal 1 ayat 1 UUD 1945

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik.

“Bagus sekali. Nah, anak-anak, karena negara kita bentuk pemerintahannya republik, maka negara kita dikepalai oleh presiden,” jelas Pak Darma.



Sumber: *Ensiklopedi Umum Untuk Pelajar*, 2005

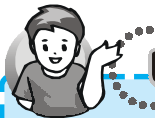
Gambar 1.2 Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kalla adalah Presiden dan Wakil Presiden yang pertama kali dipilih langsung oleh rakyat.

“Selain itu, negara kita menganut Wawasan Nusantara yang menyatakan bahwa wilayah Indonesia merupakan kesatuan politik, sosial budaya, pertahanan/keamanan, dan ekonomi yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Adapun unsur-unsur persatuan dan kesatuan sudah ada sejak negara kita berdiri, yakni seperti yang termaktub dalam UUD 1945, yang meliputi:

1. Pasal 35, Bendera negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.
2. Pasal 36, Bahasa negara ialah bahasa Indonesia.
3. Pasal 36A. Lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
4. Pasal 36 B, Lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya.
5. Pasal 36 C, Ketentuan lebih lanjut mengenai bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan diatur dengan undang-undang.

Pak Darma mengakhiri penjelasannya dengan memberi pertanyaan. Pertanyaan beliau seperti uji wawasan berikut.

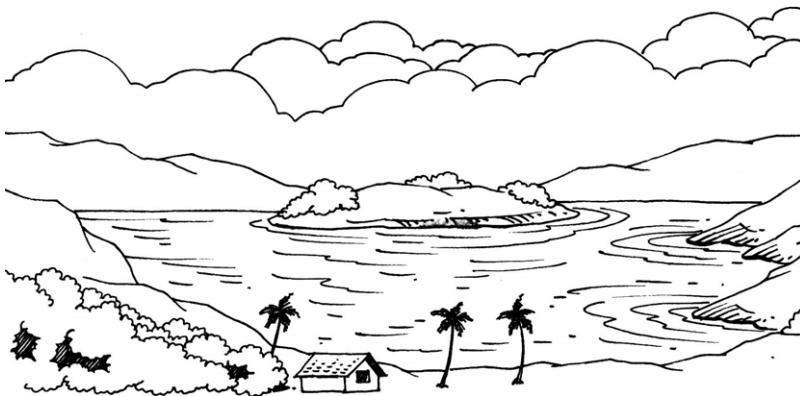


Uji Wawasan

Kerjakan soal-soal berikut di buku tugasmu.

1. Sebutkan dasar hukum pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Sejak kapan negara Indonesia merdeka dan berdaulat?
3. Apakah yang dimaksud Republik?

B. Mengetahui Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia



Gambar 1.3 Wilayah Indonesia terdiri atas udara, daratan, dan perairan.

Pak Darma melanjutkan pelajaran. Anak-anak mendengarkan dengan saksama.

“Adakah yang tahu mengenai wilayah Indonesia?” tanya Pak Darma.

“Saya, Pak. Indonesia terdiri atas wilayah perairan dan daratan serta udara. Wilayah daratan berupa pulau-pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dan jumlahnya pun lebih dari 17.000. Ada pulau besar dan ada pulau-pulau kecil.

Wilayah perairan Indonesia meliputi lautan, sungai, danau, waduk, dan lain-lain. Adapun wilayah udara adalah semua keadaan udara yang berada di atas wilayah perairan dan daratan Indonesia,” jawab Atep dengan mantap.

“Bagus dan lengkap sekali jawabanmu Atep. Bapak bangga padamu. Sekarang giliran anak yang lain. Coba sebutkan letak wilayah Indonesia,” pinta Pak Darma.

Semua anak terdiam. Mereka terlihat berpikir keras. Namun, tidak ada satu pun yang bisa menjawabnya.

“Baiklah, anak-anak, jika tidak tahu berikut akan Bapak jelaskan.

Letak Negara Kesatuan Republik Indonesia

1. Astronomis

6° LU - 11° LS dan 95° BT - 141° BT

2. Geografis

- a. Terletak di antara 2 benua ialah Benua Asia dan Benua Australia.
- b. Terletak di antara 2 samudra ialah Samudra Hindia dan Samudra Pasifik.

Baiklah, anak-anak, sekarang Bapak beri tugas. Silahkan membuat kesimpulan mengenai wilayah NKRI. Kerjakan secara berkelompok di rumah,” pinta Pak Darma sekaligus mengakhiri pelajaran.

Tet ... tet ... tet Bel berbunyi 3 kali. Tanda pelajaran selesai. Anak-anak keluar kelas dengan tertib. Mereka berjanji untuk belajar kelompok.

Sementara itu di rumah Ida, Togar dan Atep sudah siap belajar kelompok.

“Wah, kalau tugasnya seperti ini mengasyikkan,” tiba-tiba Atep angkat bicara.

“Maksudmu apa, Atep?” tanya Togar.

“Ya, selain tugas dapat cepat selesai dengan dikerjakan bersama, perutku juga menjadi kenyang, karena ada makanan dari tuan rumah,” jawab Atep tersenyum malu.

Ha ... ha ... ha Semuanya tertawa.

“Oh, itu maksudmu. Bagaimana, apakah sudah dicatat ruang lingkup wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia?” tanya Togar.

“Sudah, teman-teman. Dengarkan, berikut akan saya bacakan. Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas wilayah daratan, perairan, dan udara,” kata Ida.

“Tapi, mana penjelasannya?” tanya Atep.

“O, iya, saya lupa. Coba perhatikan tulisanku ini,” pinta Ida.

Ruang Lingkup Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

1. Wilayah daratan mencakup daerah pantai, daratan, dan dataran tinggi.
2. Wilayah NKRI terbagi menjadi 33 provinsi yang masing-masing dikepalai seorang gubernur.
3. Wilayah NKRI merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, sehingga dijuluki Negara Kepulauan. Adapun jumlah pulaunya mencapai 17.508 buah pulau.
4. Luas wilayah perairan NKRI lebih besar dibanding luas daratannya, sehingga disebut juga Negara Maritim. Adapun luas wilayah perairannya mencapai 51.766.800 km².

“Wah, jelas sekali penjelasanmu, Ida,” puji Togar.

“Terima kasih. Tapi saya kesulitan mencari batas wilayah NKRI. Bagaimana menurutmu?” kata Ida meminta pertimbangan.

“Bagaimana kalau kita cari saja di atlas?” jawab Atep.

“Setuju ...,” jawab Ida dan Togar.

Mereka segera sibuk membolak-balik atlas guna mencari batas wilayah NKRI.

“Nah, ini batas-batas negara kita. Coba perhatikan, di sebelah utara ada Malaysia Timur dan Filipina,” terang Ida.

“Di sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini, sedangkan bagian selatan, ada negara Timor Leste,” imbuah Togar.

Akhirnya tugas telah mereka selesaikan. Togar dan Atep pamit pulang. Mereka menyiapkan peralatan dan jadwal untuk pelajaran sekolah besok hari.

Pagi-pagi sekali, Ida, Togar, dan Atep sudah sampai di sekolah. Mereka adalah murid-murid yang disiplin. Tidak pernah datang terlambat ke sekolah. Karena belum jam masuk sekolah, mereka duduk di taman sekolah. Mereka juga mengambil majalah dari perpustakaan.

Mereka membaca artikel yang menceritakan nasib nelayan Indonesia yang ditangkap di Australia. Penyebabnya karena para nelayan melanggar batas teritorial wilayah laut Australia.

“Gar, sebenarnya apa yang dimaksud wilayah laut teritorial?” tanya Ida.

“Iya, saya sendiri juga bingung,” kata Togar sambil menggaruk-garuk kepalanya.

Pak Darma tiba-tiba mendekat. Beliau tertarik melihat Togar.

“Kenapa, Gar? Kamu belum keramas, ya?” tanya Pak Darma penuh canda.

“Oh, Pak Darma. Tidak apa-apa, Pak, kami cuma bingung,” jawab Wayan.

“Memangnya ada apa?” Pak Darma mencoba memperjelas.

“Begini, Pak. Kami sedang membaca artikel ini dan kami bingung mencari makna laut teritorial,” jelas Atep panjang lebar.

“Baiklah, Bapak akan bantu jelaskan. Tapi kita cari tempat duduk di taman sekolah saja, supaya nyaman,” kata Pak Darma.

Akhirnya mereka berjalan mengiringi Pak Darma menuju taman sekolah.

“Indonesia adalah negara yang sangat luas dan kaya, “ kata Pak Darma.

“Secara keseluruhan, berapa perbandingan luas laut dan daratan kita, Pak?” tanya Atep.

“Luas lautan kita 3.257.357 km², sedangkan luas daratan hanya 1.919.442 km² atau 63% dibanding 37%. Karena lebih luas wilayah lautnya, maka negara kita disebut Negara Maritim,” jelas Pak Darma.

“Kalau begitu, apa maksudnya laut teritorial, Pak?” tanya Togar tidak sabar.

“Wah, sepertinya kalian tidak sabar, ya? Laut teritorial adalah laut yang berada dalam wilayah negara sejauh 12 mil. Negara tersebut berhak memanfaatkan segala kekayaan baik di dasar dan tanah di bawahnya,” papar Pak Darma.

“Saya paham sekarang. Berarti nelayan Indonesia yang ditangkap itu karena melanggar batas wilayah laut teritorial, kan, Pak?” selidik Ida.

“Benar, anak-anak,” kata Pak Darma.

“Pak, saya pernah membaca istilah ZEE, apa maksudnya, Pak?” tanya Atep.

Sambil membuka bukunya, Pak Darma menawarkan kepada anak yang lain yang bersedia menjawab. Togar segera menyahut.

“Zona Ekonomi Eksklusif yaitu laut sejauh 200 mil dari garis terluar pantai sebuah pulau dan masih dapat digali sumber kekayaan di dalamnya,” jelas Togar.

“Benar, Togar. ZEE sendiri ditetapkan pada 21 Maret 1980. Isinya sebagai berikut,” jelas Pak Darma sambil memperlihatkan bukunya kepada anak-anak.

1. Laut wilayah Indonesia selebar 200 mil diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.
2. Pemerintah berhak mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya hayati dan nonhayati yang ada di dasar dan tanah di bawah laut serta airnya.
3. Pemerintah memiliki kebebasan melakukan pelayaran dan penerbangan sesuai prinsip hukum laut Internasional.

“Pak, bagaimana jika lebar laut kita tidak ada 200 mil atau berbatasan dengan negara lain?” tanya Ida.

“Iya, Pak, seperti dengan Malaysia, Singapura atau Filipina,” tambah Atep.

“Jika demikian, maka akan dibicarakan antara kedua belah pihak atau dua negara tersebut, misalnya dengan perjanjian,” jelas Pak Darma.

“Baik anak-anak, Pak Darma harus ke kantor sekarang. Semoga kalian paham,” Pak Darma mengakhiri penjelasannya.

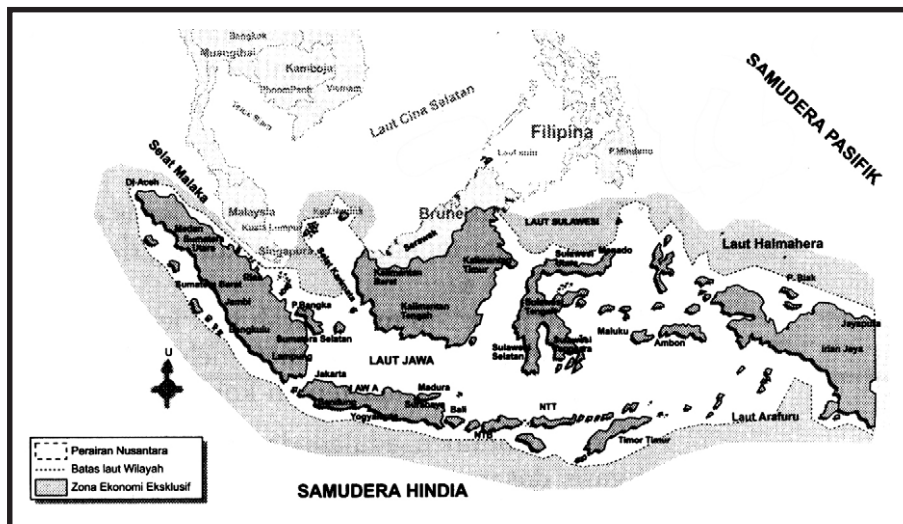
“Terima kasih, Pak,” kata Atep, Togar, dan Ida bersamaan.

“Wah, syukur kita sudah dibantu Pak Darma. Tapi, masih ada yang kurang, kalau batas landas kontinen itu apa, ya?” tanya Ida.

“Ida, Ida, kamu ini aneh. Bukankah tadi kita sudah membacanya di *mading* sekolah,” jawab Togar dan Atep diiringi tawa mereka.

Batas Landas Kontinen ialah dasar laut dari arah pantai ke tengah laut dengan kedalaman tidak lebih dari 200 meter sejauh 200 mil.

Bel tanda masuk berbunyi. Atep, Togar, dan Ida segera masuk kelas. Mereka bersiap-siap mempresentasikan tugas yang diberikan Pak Darma.



Sumber: *Atlas Indonesia dan Dunia*, 2003

Gambar 1.4 Batas wilayah laut Indonesia.

“Pak Darma senang, kalian telah melaksanakan tugas dengan baik. Ada yang masih belum paham?” tanya Pak Darma.

“Saya, Pak. Bagaimana dengan wilayah udara kita?” tanya Atep.

“Anak-anak yang cerdas, sebenarnya wilayah ruang udara di atas Indonesia belum memiliki batas. Meskipun demikian, dalam UUD 1945 telah diatur dan disebutkan bahwa wilayah nasional meliputi bukan hanya darat dan laut, tapi juga udara. Penetapan batas wilayah nasional ini dibenarkan meski di tingkat

internasional belum ada ketentuan untuk itu. Batas ruang udara yang telah ditetapkan di tingkat nasional ini kemudian dapat dilaporkan ke PBB.

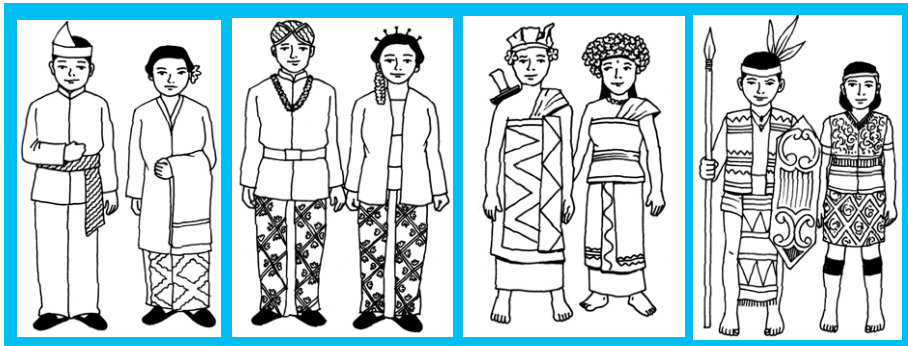
Dalam hal ini, batas wilayah udara Indonesia yang ideal adalah hingga 100 kilometer dari permukaan bumi. Saat ini Rusia, Amerika Serikat, dan Israel juga berkisar 100-150 kilometer. Jika Indonesia telah menetapkan ruang udara sampai batas tertentu, semua pesawat yang lewat wilayah udara harus minta izin. Dan jika ada pelanggaran terhadap batas wilayah itu Indonesia dapat melakukan tindakan,” jelas Pak Darma.



Uji Wawasan

Beberapa waktu yang lalu Indonesia sempat bersitegang dengan Malaysia. Hal ini dipicu atas klaim Malaysia terhadap kesenian Reog Ponorogo. Bangsa Indonesia tidak bisa menerima, dan banyak yang melaksanakan protes demonstrasi. Bagaimana sikap dan pendapatmu sebagai warga negara Indonesia yang baik terhadap masalah di atas?

C. Pentingnya Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia



Gambar 1.5 Indonesia kaya akan budaya.

“Anak-anak, kalian pasti sudah mendengar bahwa dua pulau Indonesia, yakni Sipadan dan Ligitan di Kalimantan telah lepas ke tangan negara lain. Ada juga kasus kesenian dan budaya kita yang diakui sebagai milik bangsa lain. Menurut kalian, apa yang menjadi penyebabnya?” tanya Pak Darma.

“Saya, Pak. Salah satunya karena kita kurang berhati-hati menjaga keutuhan NKRI,” jawab Ida.

“Kurangnya rakyat Indonesia dalam mencintai budayanya sendiri dan lebih menyukai budaya asing,” tegas Atep.

“Mungkin karena kita juga lupa belajar tentang sejarah berdirinya NKRI, Pak,” jawab Togar tak mau ketinggalan.

“Bagus, anak-anak. Siapa yang ingat tokoh Kerajaan Majapahit yang ingin mempersatukan Nusantara?” tanya Pak Darma.

“Maha Patih Gajah Mada, Pak. Sampai beliau bersumpah tidak akan makan buah kelapa sebelum menyatukan Nusantara. Dan akhirnya Majapahit pun dapat menguasai seluruh wilayah Nusantara,” jelas Atep.

“Pak, bukankah kemerdekaan kita juga diraih karena adanya rasa persatuan dan kesatuan?” tanya Ida.

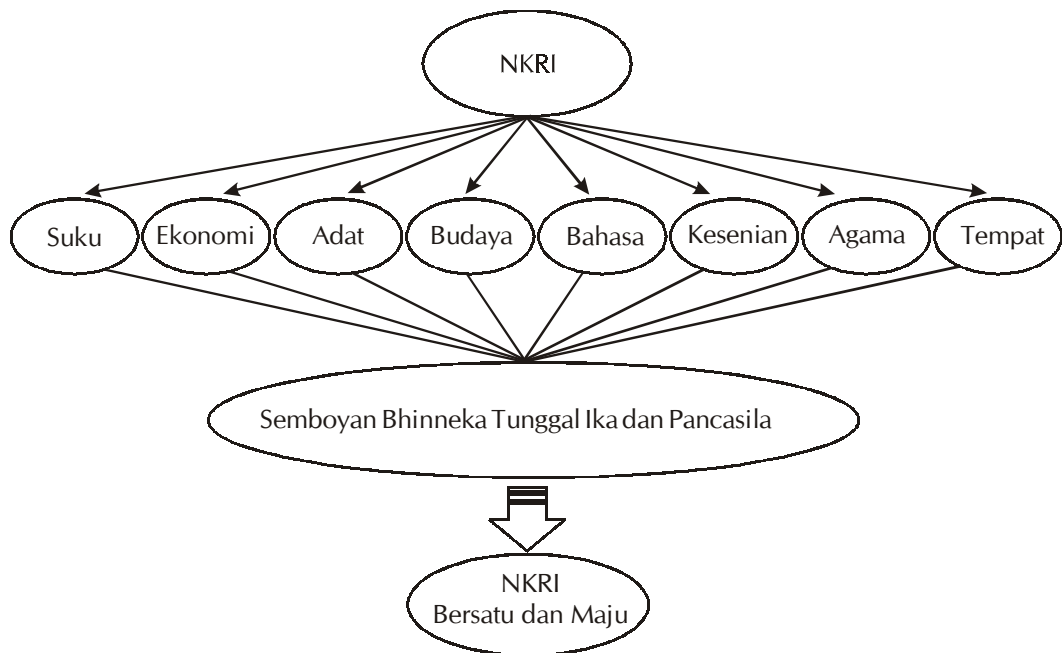
“Benar, Ida. Momentum besar 28 Oktober 1928 telah mengubah corak perjuangan bangsa. Dengan Sumpah Pemuda kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia mulai terbangun,” jelas Pak Darma.

Sumpah Pemuda

1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia
2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia
3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia

“Pak, bagaimana dengan keragaman bangsa kita?” tanya Atep.

“Negara kita memang majemuk, terdiri atas berbagai unsur. Coba perhatikan skema berikut.



“Bagaimana kita menyikapi perbedaan-perbedaan tersebut, Pak?” tanya Togar.

“Bukankah pelangi tidak jadi indah kalau hanya berwarna merah? Begitu juga Indonesia. Negara kita yang indah karena kaya akan keragaman. Perbedaan itu bukan sebagai pemisah dan penyebab kerusuhan. Justru kita harus termotivasi untuk saling membantu sesama, saling belajar, saling melengkapi, dan saling mempertahankan negara ini. Bukankah kita ibarat satu tubuh. Jika ada bagian tubuh yang sakit maka bagian tubuh yang lain juga akan merasakan sakit. Sebenarnya, jika keutuhan bangsa bisa kita jaga, kita akan mampu mengatasi segala ancaman dan masalah bangsa baik dari dalam atau luar negeri,” jelas Pak Darma panjang lebar.

“Lho, bukankah sudah ada TNI, Pak?” Togar masih bertanya.

“Benar, TNI berperan sebagai alat pertahanan NKRI baik di darat, laut, dan udara. Tapi tugas menjaga keutuhan bangsa dan membela negara adalah kewajiban setiap warga negara,” jawab Pak Darma.



Gambar 1.6 TNI berbaris.

Uji-Wawasan

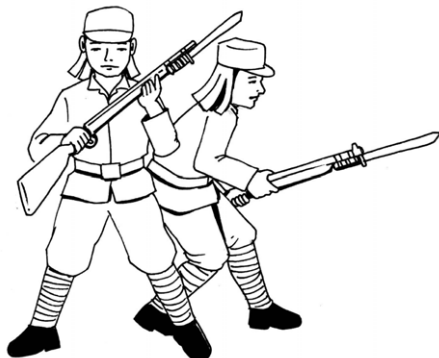
1. Buatlah kelompok maksimal 3 orang.
2. Diskusikan permasalahan berikut dan berilah solusi penyelesaiannya.

Siang itu Joko dan Dani bertengkar. Permasalahannya sepele. Dani tersinggung karena Joko mengolok-olok rambutnya yang keriting. Memang keluarga Dani berasal dari Papua. Akibatnya tugas kelompok mereka pun tidak selesai dan keduanya dinasihati Pak Guru.

- Bagaimana pendapatmu tentang kasus di atas?
- Apa yang terjadi jika perbedaan selalu dipermasalahkan?

D. Perilaku Menjaga Keutuhan NKRI

Pak Darma melanjutkan penjelasannya. Anak-anak pun mendengarkan dengan antusias.



Gambar 1.7 Penjajah telah bertahun-tahun menjajah Indonesia, namun NKRI tetap kokoh berdiri.

“Wilayah kita yang terdiri atas beragam suku, agama, budaya, dan bahasa sangat rentan terhadap perpecahan, baik konflik etnis, agama, dan kelompok. Sejarah telah membuktikan bahwa NKRI adalah bentuk yang tepat untuk membangun bangsa. Negara kita pernah dirongrong oleh sekelompok orang yang ingin memecah NKRI,” Pak Darma memulai penjelasannya.

“Bagaimana ceritanya, Pak?” tanya Atep.

“Contoh-contoh gerakan separatis yang ingin memisahkan diri dari NKRI ialah:

1. Pemberontakan PKI di Madiun 1948
2. DI/TII
3. Negara Republik Maluku Selatan (RMS) tahun 1950
4. Gerakan Aceh Merdeka (GAM)
5. Gerakan Papua Merdeka (OPM)

“Pak, apakah di era sekarang juga masih ada?” tanya Ida.

“Ada, tetapi bentuknya lain, yaitu kerusuhan. Pernah terjadi di tahun 1998, di mana terjadi kerusuhan dan penjarahan di mana-mana. Ada juga sekelompok orang yang tidak sepakat dengan kebijakan pemerintah, kemudian berdemonstrasi dan melakukan tindakan anarki sehingga merugikan orang lain,” jelas Pak Darma.

“Lalu, bagaimana kita harus bersikap untuk menjaga keutuhan NKRI, Pak?” tanya Atep.

“Kita harus hidup rukun baik di keluarga, sekolah, atau masyarakat. Kita juga harus mematuhi peraturan yang berlaku, saling membantu sesama, dan toleransi beragama,” jelas Pak Darma.

Upaya menjaga kesatuan dan keutuhan NKRI sebagai berikut.

1. Menjaga kerukunan hidup beragama sesuai dengan dasar agama dan norma Pancasila.

2. Menjaga ketahanan nasional dalam menghadapi tantangan dan ancaman bangsa.
3. Menjadi pemeluk agama yang taat dan sesuai agamanya.
4. Menjalankan perintah dan larangan Tuhan.
5. Menjalankan nilai-nilai positif yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945.
6. Toleransi.
7. Setia kawan.
8. Berkarya untuk kemajuan bangsa.



Uji Wawasan

Kerjakan soal-soal berikut di buku tugasmu.

1. Apakah yang kamu ketahui tentang demonstrasi? Berikan juga tanggapanmu tentang demonstrasi.
2. Tuliskan puisi dengan tema Keberagaman Indonesia. Bacakan di kelasmu.



Praktik Kerja

Pilihlah salah satu pulau di Indonesia. Tuliskan keanekaragaman yang ada di sana.

Nama Pulau :

Jumlah provinsi	Nama provinsi	Nama suku	Nama pakaian adat	Nama tarian	Nama lagu daerah	Nama bahasa daerah	Nama rumah adat



Rangkuman

- Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik.
- Secara geografis wilayah NKRI diapit 2 benua (Benua Asia dan Benua Australia) serta 2 samudra (Samudra Hindia dan Samudra Pasifik).
- Secara astronomi wilayah NKRI terletak di 6° LU – 11° LS dan 65° BT – 141° BT.
- Wilayah Indonesia pada awal kemerdekaan hanya terdiri atas 8 provinsi. Tetapi sekarang telah berkembang menjadi 33 provinsi.
- Indonesia kaya akan budaya, bahasa, adat istiadat, yang semuanya menjadi perekat persatuan Indonesia.



Uji Kompetensi

Kerjakan soal-soal berikut di buku tugasmu.

A. Ayo, pilihlah jawaban yang benar.

1. Secara astronomis Indonesia terletak pada
 - a. 6° LU – 11° LS dan 95° BT – 141° BT
 - b. 6° LU – 11° LU dan 95° BT – 141° BT
 - c. 6° LU – 11° LS dan 65° BT – 141° BT
 - d. 6° LS – 11° LS dan 95° BT – 141° BT
2. Wilayah ujung utara Indonesia ialah
 - a. Merauke
 - b. Sabang
 - c. Gorontalo
 - d. Sangehe dan Talaud
3. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Hal ini tertulis dalam UUD 1945 pasal
 - a. 1 ayat 1
 - b. 4 ayat 1
 - c. 1 ayat 2
 - d. 2 ayat 2
4. Batas wilayah Indonesia diukur sejauh 12 mil dari garis pangkal adalah salah satu isi
 - a. Konvensi Hukum Laut Internasional
 - b. Deklarasi Djuanda
 - c. Hukum Laut Hindia Belanda
 - d. Zona Ekonomi Eksklusif

5. Ketahanan nasional merupakan daya tahan suatu negara untuk menghadapi
- kudeta negara
 - pemberontakan
 - ancaman dan gangguan
 - musuh negara

6.



Kesenian daerah di atas berasal dari

- Provinsi Jawa Timur
 - Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
 - Provinsi Kalimantan Barat
 - Provinsi Gorontalo
7. Perbedaan suku, ras, agama, dan budaya di Indonesia harus bisa menjadi semangat untuk
- saling mencari keuntungan daerahnya
 - saling memajukan daerahnya sendiri dengan fanatisme
 - saling memahami kebijaksanaan masing-masing
 - saling mempelajari agama di daerah lain
8. Negara yang merdeka dan berdaulat disebut juga
- negara republik
 - negara merdeka
 - negara kesatuan
 - negara bagian
9. *Butet berteman baik dengan Teuku Hasan, teman sekelasnya. Dalam berkomunikasi Butet dan Teuku memakai bahasa Indonesia.*
- Hal ini membuktikan bahasa Indonesia sebagai bahasa
- komunikasi efektif
 - pergaulan
 - persatuan
 - percakapan sehari-hari
10. Salah satu cara menjaga ketahanan negara ialah
- menjaga kerukunan hidup beragama dan bermasyarakat
 - menjaga kehidupan pribadi
 - memupuk rasa sosial ketika dibutuhkan
 - menghapuskan rasa sayang kepada sesama

11. Sekelompok manusia dengan ciri budaya yang sama disebut
 - a. penduduk
 - b. warga negara
 - c. bangsa
 - d. negara
12. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan tanggal
 - a. 20 Agustus 1945
 - b. 19 Agustus 1945
 - c. 18 Agustus 1945
 - d. 17 Agustus 1945
13. Berikut ini merupakan wilayah NKRI pada awal kemerdekaan, *kecuali*
 - a. Kalimantan
 - b. Sumatra
 - c. Jawa Barat
 - d. Bali
14. Provinsi dikepalai oleh seorang
 - a. bupati/walikota
 - b. gubernur
 - c. menteri
 - d. presiden
15. Indonesia mempunyai wilayah yang terdiri atas
 - a. lautan
 - b. gunung dan lembah
 - c. lautan dan daratan
 - d. pegunungan dan lautan
16. Indonesia berada di antara dua samudra, yaitu
 - a. Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik
 - b. Samudra Hindia dan Samudra Atlantik
 - c. Samudra Hindia dan Samudra Pasifik
 - d. Samudra Hindia dan Samudra Australia
17. Batas laut teritorial Indonesia adalah
 - a. 200 mil
 - b. 20 mil
 - c. 12 mil
 - d. 10 mil
18. Wilayah Indonesia bagian utara berbatasan dengan
 - a. Malaysia Barat dan Filipina
 - b. Malaysia Timur dan Filipina
 - c. Singapura dan Thailand
 - d. Filipina dan Thailand

19. Batas wilayah kedaulatan dirgantara yang termasuk orbit geostasioner berdasarkan UU No. 20 Tahun 1982 adalah
 - a. 32.439 km
 - b. 34.445 km
 - c. 35.760 km
 - d. 35.761 km
20. Pemekaran provinsi bertujuan untuk
 - a. memaksimalkan pelayanan masyarakat
 - b. meningkatkan jumlah penduduk
 - c. memperluas wilayah Indonesia
 - d. meningkatkan persatuan dan kesatuan

B. Ayo, isilah titik-titik berikut dengan tepat di buku tugasmu.

1. Jumlah provinsi di Indonesia ialah
2. Indonesia berhak mengatur nasib negaranya sendiri sejak tanggal
3. Dua samudra yang mengapit negara Indonesia ialah
4. Dalam ZEE, pemerintah mempunyai hak untuk ... dan ... sumber daya di laut.
5. Deklarasi Djuanda diakui sebagai Hukum Laut Internasional di Kota
6. Peraturan perundangan harus ditaati untuk menciptakan
7. Batas kedaulatan wilayah udara Indonesia diatur oleh
8. Keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan tanggung jawab
9. Pengertian landas kontinen adalah
10. Sikap dan tingkah laku warga negara Indonesia harus bercermin pada

C. Ayo, jawablah pertanyaan berikut dengan benar.

1. Jelaskan yang dimaksud laut teritorial.
2. Sebutkan beberapa ancaman dari dalam negeri terhadap kesatuan negara Indonesia.
3. Sebutkan isi Sumpah Pemuda.
4. Mengapa kita wajib menjaga keutuhan negara Indonesia?
5. Sebutkan batas-batas negara Indonesia.

Bab 2

Peraturan Perundang-Undangan



Tahukah kalian mengapa orang ditangkap polisi dan dipenjara?

Apa yang mereka lakukan?

Ya, orang dipenjara karena telah melanggar peraturan perundang-undangan.

Di samping itu, tahukah kalian mengapa di jalan raya diberi lampu lalu lintas?

Tahu jugakah kalian, mengapa di sekolah dibuat tata tertib?

Peraturan atau tata tertib dibuat agar kehidupan menjadi teratur, aman, tenang, dan damai.



Tujuan Pembelajaran

Tujuan pembelajaranmu pada bab ini adalah:

- ❖ mampu menjelaskan pengertian peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah dengan benar;
- ❖ mampu menjelaskan pentingnya peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah dengan benar;
- ❖ mampu menyebutkan contoh-contoh peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah dengan benar.

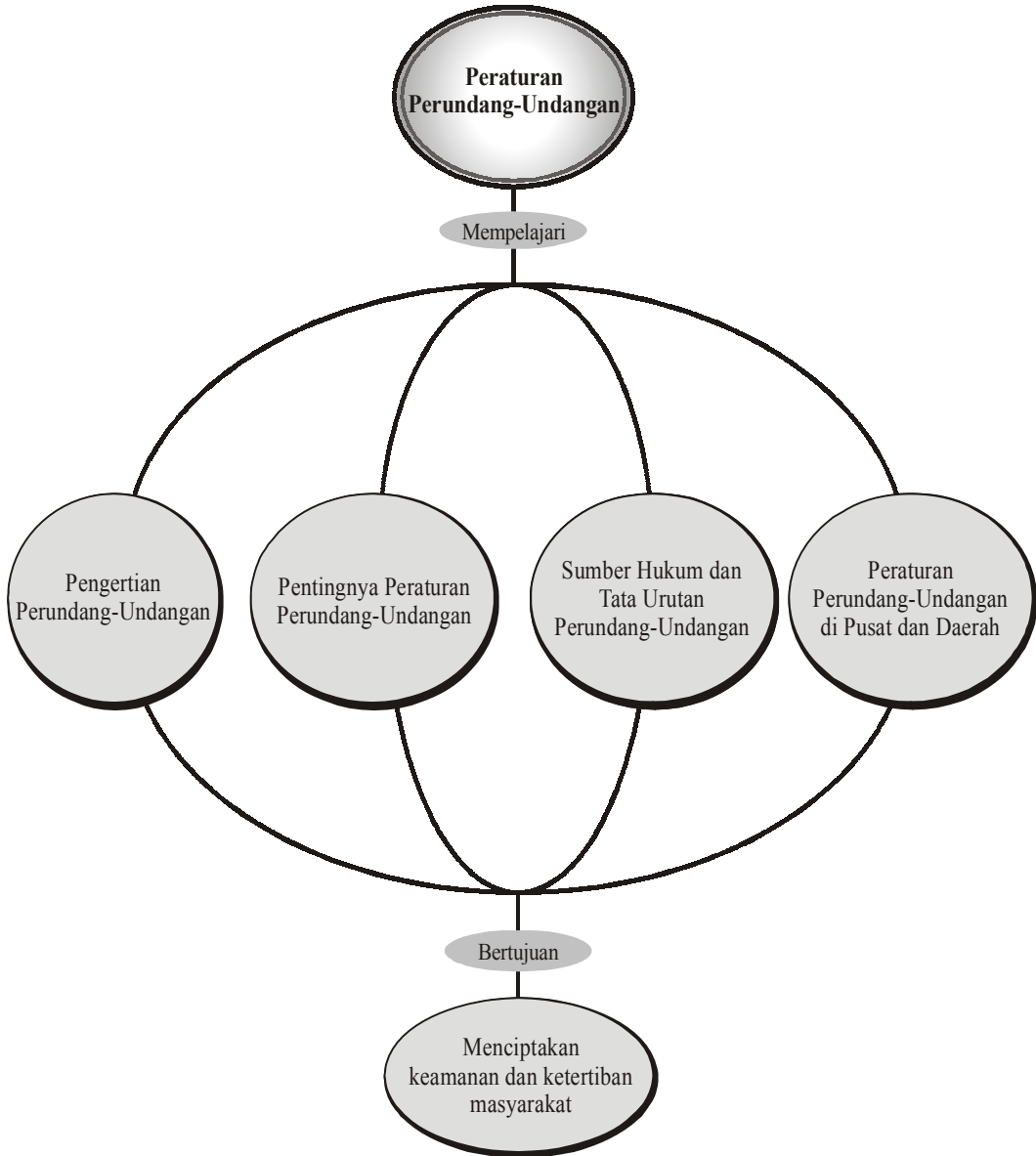


Kata Kunci

- ❖ undang-undang
- ❖ MPR
- ❖ peraturan
- ❖ DPR



Peta Konsep

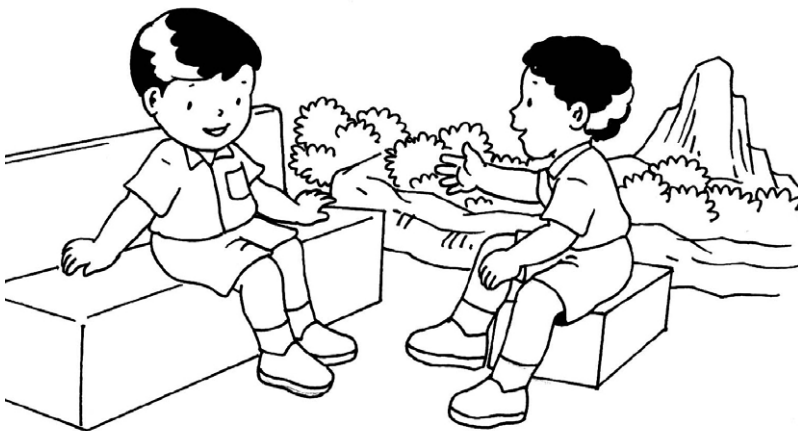


A. Pengertian Perundang-Undangan

Hukum memiliki dua bentuk, yaitu hukum tertulis dan tidak tertulis. Hukum tertulis ialah perundang-undangan, sedangkan hukum tidak tertulis ialah adat kebiasaan. Tujuan hukum ialah mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib dan teratur di wilayah Republik Indonesia.

Asas-asas pembuatan perundang-undangan meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan yang tepat, kesesuaian antara jenis dan muatan materi, dapat dilaksanakan, kedayagunaan, kejelasan rumusan, serta keterbukaan. Adapun, urutan pembuatan peraturan perundang-undangan ialah:

1. Membuat rancangan peraturan.
2. Membahas rancangan peraturan perundang-undangan.
3. Menetapkan rancangan peraturan perundang-undangan.
4. Mensahkan peraturan perundang-undangan.
5. Keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam pembuatan perundang-undangan ialah:
 - a. Memberikan evaluasi terhadap isi atau materi rancangan peraturan perundang-undangan.
 - b. Memberikan masukan, saran, dan kritik kepada pemerintah, DPR/ DPRD.



Gambar 2.1 Atep dan Togar berbincang-bincang di taman.

“Atep, tadi pagi saya melihat seorang laki-laki tewas tertabrak bus,” Togar bercerita dengan berapi-api.

“Memangnya busnya ngebut, Gar? Kok, sampai pengendara sepedanya tewas?” tanya Atep lagi.

“Sebenarnya busnya tidak ngebut. Tetapi sopirnya melanggar lampu lalu lintas,” jelas Togar.

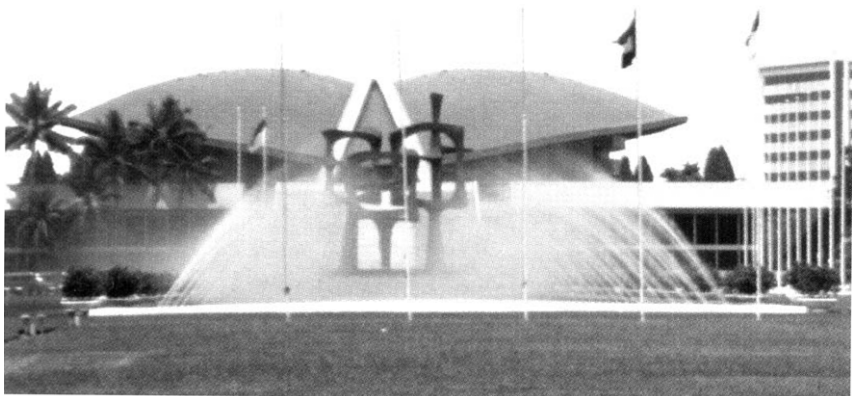
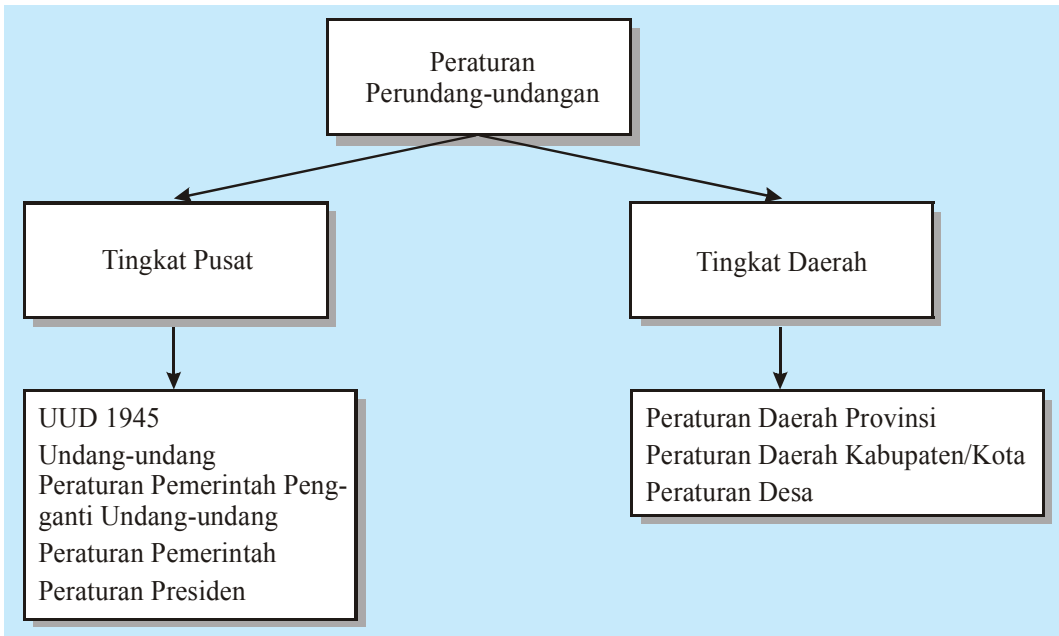
“Wah, itu namanya melanggar undang-undang lalu lintas, bisa dihukum, Gar. Apalagi negara kita adalah negara hukum,” jelas Atep.

Togar terlihat kebingungan. “Undang-undang, negara hukum, apa maksudnya? Kenapa harus diatur undang-undang?” tanya Togar.

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Indonesia ialah negara hukum yang berarti hukum menjadi dasar pedoman dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

“Lalu apa yang dimaksud perundang-undangan, Tep?” tanya Togar.

“Secara sederhana, perundang-undangan berarti peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara/pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum,” jelas Atep.



Sumber: *Ensiklopedi Umum untuk Pelajar*, 2005

Gambar 2.2 Gedung MPR/DPR RI.

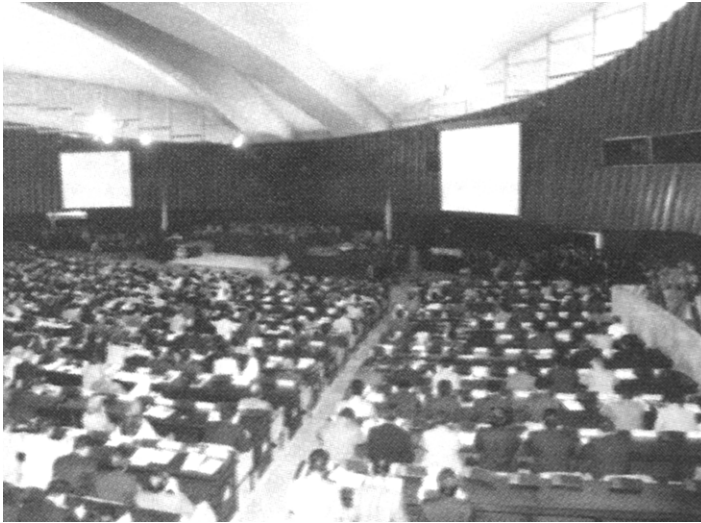
“Oh, jadi masing-masing tingkat pemerintahan mempunyai peraturan perundang-undangan sendiri. Tapi kenapa bisa begitu banyak peraturan, Tep?” tanya Togar penasaran.

“Peraturan perundang-undangan pusat berlaku untuk lembaga-lembaga negara dan warga negara Indonesia. Adapun yang tingkat daerah berlaku untuk warga daerah yang bersangkutan, karena masing-masing daerah memiliki perbedaan dan potensi masing-masing,” jawab Togar.

“Wah, seru sekali, sedang mendiskusikan apa?” tiba-tiba Ida datang.

“Kami sedang berdiskusi mengenai perundang-undangan. Tapi Togar masih mengalami kebingungan,” jawab Atep.

“Ida, kamu tahu tidak, bagaimana cara pembuatan peraturan perundang-undangan itu?” tanya Togar ganti bertanya pada Ida.



Sumber: *Ensiklopedi Umum untuk Pelajar*, 2005

Gambar 2.3 Suasana Sidang DPR.

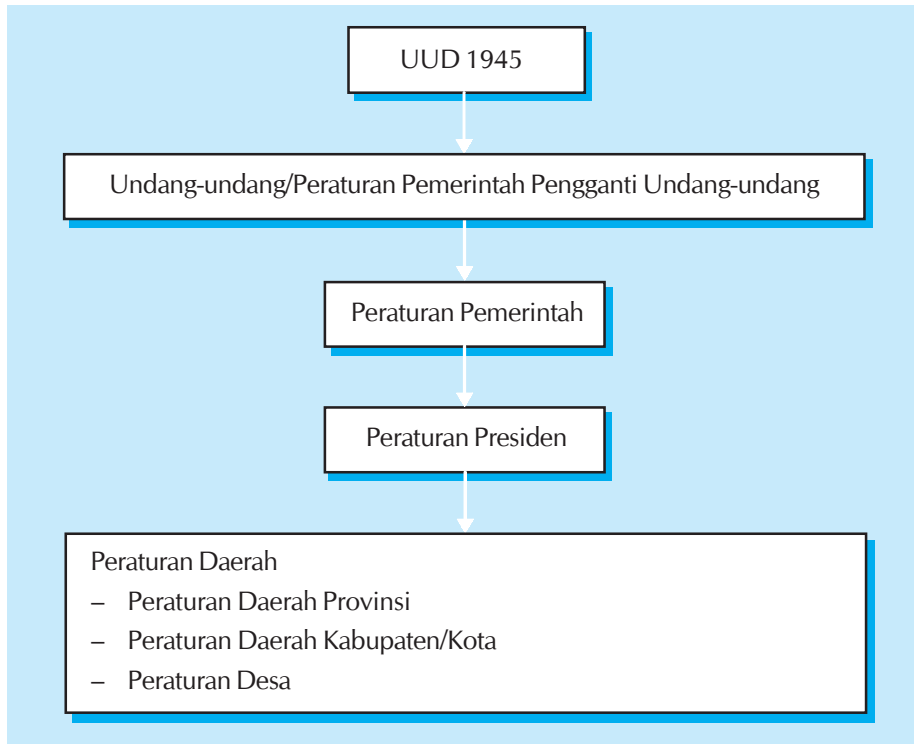
“Singkatnya, untuk membuat peraturan perundang-undangan meliputi perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Jadi, tidak seperti orang membuat baju, satu dua minggu selesai. Tetapi butuh waktu dan pemikiran matang,” jawab Ida.

“Apakah cara pembentukannya juga diatur, Da?” tanya Togar.

“Benar, teman. Supaya mempunyai kekuatan hukum,” jawab Ida.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004.

Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah:



B. Pentingnya Peraturan Perundang-Undangan

“Teman-teman, menurut kalian, mengapa pemerintah membuat peraturan perundang-undangan yang rumit dan susah?” tanya Togar.

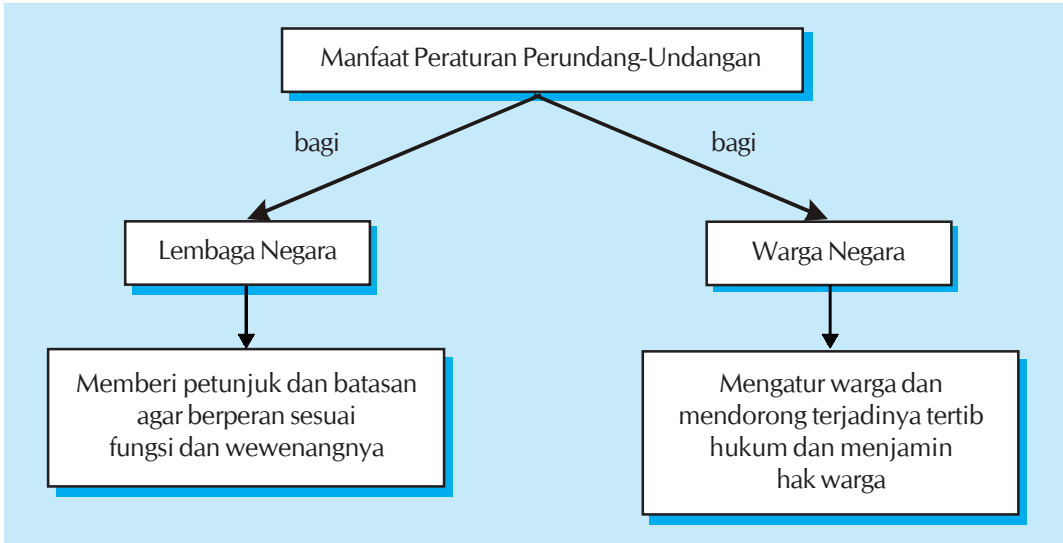
“Wah, Togar ketinggalan zaman. Bukankah Indonesia adalah negara hukum? Jadi segala sesuatunya harus berdasarkan hukum,” jelas Atep.

“Maksudnya?” tanya Togar.

“Artinya untuk mewujudkan agar menjadi negara hukum tersebut diperlukan tatanan yang tertib,” jelas Ida.

“Lalu, apa arti pentingnya peraturan perundang-undangan itu?” tanya Togar.

“Peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat atau daerah akan menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara aman dan tertib. Kehidupan yang demikian merupakan cita-cita dari negara hukum Indonesia. Di mana tercipta negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah daerah Indonesia,” jelas Atep.



“Teman-teman, kira-kira apa saja yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, ya?” tanya Togar.

“Pastinya mengatur hak dan kewajiban kita sebagai warga negara,” jelas Ida.

“Wah, cerdas sekali, kamu, Ida,” kata Togar sambil tertawa.

C. Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan



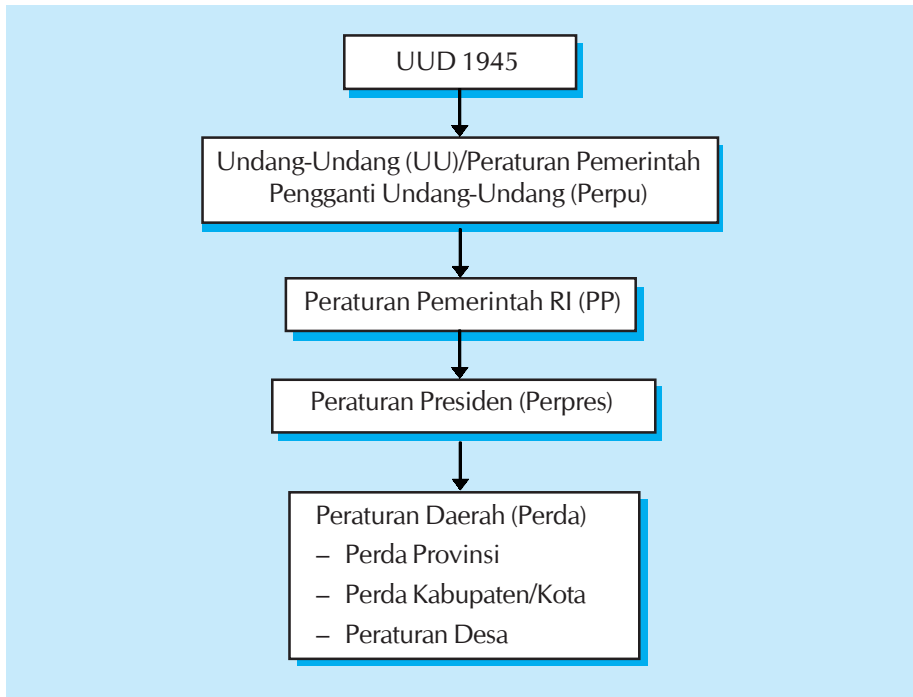
Sumber: *Dok. Penerbit*

Gambar 2.4 Naskah UUD 1945.

“Mengapa dalam UU No. 10 Tahun 2004 menyebutkan bahwa peraturan perundang-undangan tertinggi negara kita adalah UUD 1945?” tanya Atep.

“Memang benar, Tep. Hal itu dikarenakan dalam UUD 1945 memuat dasar negara, yaitu Pancasila,” jelas Ida.

“Artinya juga peraturan perundang-undangan yang lain tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945,” tambah Togar.



1. UUD 1945

UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis negara Republik Indonesia yang memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara. UUD 1945 telah mengalami beberapa perubahan, terutama dalam pasal-pasal. Adapun dalam Pembukaannya tetap, tidak ada perubahan.

Poses pelaksanaan perubahan UUD 1945 oleh MPR sebagai berikut.

- a. Sidang Umum MPR 1999 tanggal 19 Oktober 1999.
- b. Sidang Tahunan MPR tahun 2000 tanggal 18 Agustus 2000.
- c. Sidang Tahunan MPR tahun 2001 tanggal 9 November 2001.
- d. Sidang Tahunan MPR tahun 2002 tanggal 10 Agustus 2002.

2. Undang-undang dan Perpu

Undang-undang dibuat oleh DPR sebagai lembaga legislatif bersama presiden. Anggota DPR berhak mengajukan RUU (Rancangan Undang-Undang) sebelum disahkan menjadi UU (Undang-Undang). Bersama presiden, DPR akan membuat persetujuan. Dan jika dalam waktu 30 hari sejak disetujui belum disahkan presiden, otomatis RUU tersebut sah dan menjadi UU.

Adapun perpu dikeluarkan oleh presiden dalam keadaan genting dan darurat. Perpu harus diajukan dan disetujui oleh DPR agar dapat diberlakukan. Jika DPR menolak maka perpu tersebut harus dicabut.

3. Peraturan Pemerintah RI (PP)

Peraturan pemerintah dibuat untuk menjalankan undang-undang yang telah ditetapkan sebelumnya.

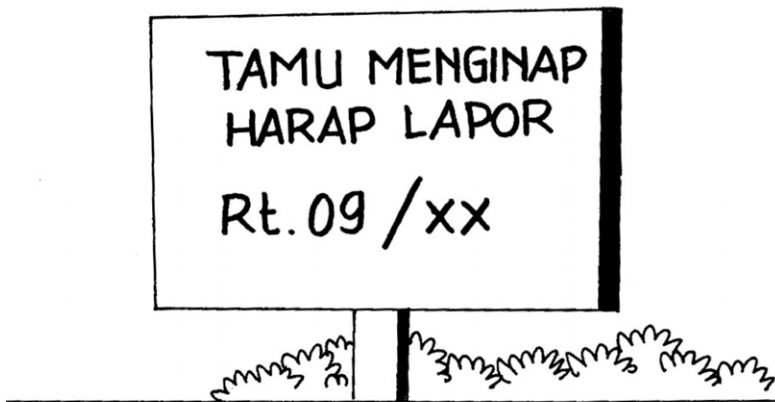
4. Peraturan Presiden

Peraturan presiden dibuat oleh presiden untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berupa pengaturan pelaksanaan administrasi negara dan pemerintahan.

5. Peraturan Daerah (Perda)

Peraturan daerah (perda) merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.

- Perda Provinsi dibuat oleh DPRD provinsi bersama gubernur.
- Perda Kabupaten dibuat oleh DPRD kabupaten bersama bupati.
- Perda Kota dibuat oleh DPRD kota bersama wali kota.
- Perdes dibuat oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) bersama dengan kepala desa.



Gambar 2.5 Contoh peraturan desa.



Uji Wawasan

Diskusikan hal-hal di bawah ini bersama temanmu.

- Mengapa pemerintah desa juga membuat peraturan perundang-undangan?
- Sebutkan contoh-contoh peraturan desa yang kalian ketahui.

D. Peraturan Perundang-Undangan di Pusat dan Daerah

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang berlaku untuk semua warga baik di tingkat pusat maupun di daerah. Semua warga negara harus mematuhi.

1. Di Tingkat Pusat

“Atep, saya prihatin atas perilaku oknum penegak hukum di negara kita,” kata Ida.

“Memangnya kenapa, Ida?” Atep balik bertanya.

“Seharusnya penegak hukum menindak tegas pelanggar undang-undang, tetapi kenapa justru ada oknum penegak hukumnya yang ditangkap?” gerutu Ida.

“Contohnya apa, Ida?” tanya Togar.

“Seperti ada oknum hakim atau jaksa yang ditangkap karena kena suap. Itu kan korupsi,” tegas Ida.

“Wah, kamu dapat informasi dari mana?” tanya Atep.

“Dari televisi dan koran. Bahkan hampir semua media cetak dan elektronik memberitakannya. Kabarnya mereka melakukan korupsi, di mana melanggar UU No. 20 Tahun 2001,” jelas Ida.

“UU No. 20 Tahun 2001 mengatur tentang apa, Ida?” tanya Togar.

“Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” jawab Ida.

“Oh, iya, saya ingat UU No. 21 Tahun 2001 merupakan salah satu contoh undang-undang di Ttingkat pusat,” sahut Atep.

Korupsi adalah tindakan seseorang yang melawan hukum untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain/korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.



Gambar 2.6 Suasana persidangan guna mencari keadilan.

“Terus, apa yang dilakukan pemerintah dalam menangani korupsi?” tanya Togar.

“Setahuku, pemerintah membentuk KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),” jawab Ida.

“Lalu, tugas KPK itu apa?” tanya Togar lagi.

Menurut Pasal 6 UU No. 30 Tahun 2002, tugas KPK sebagai berikut.

- a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindakan pidana korupsi.
- d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.
- e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

“Teman-teman, saya kemarin juga membaca koran. Ada berita tentang seorang anak dianiaya ayahnya sampai dibawa ke rumah sakit hanya karena ingin melanjutkan sekolah. Bahkan ibunya juga terkena pukulan ayahnya, sekarang juga dirawat di rumah sakit. Untungnya mereka dapat ditolong oleh tetangganya,” Togar tiba-tiba bercerita sambil menahan emosi.

“Wah, itu kabar buruk, Gar. Itu sudah termasuk tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Perbuatan itu melanggar hukum. Apalagi anak yang jadi korban,” jelas Atep.

“Apa maksudnya, Tep?” tanya Ida.

“Kekerasan dalam rumah tangga artinya perbuatan seorang anggota keluarga yang menimbulkan kesengsaraan bagi anggota keluarga yang lain, seperti menelantarkan anak, pemaksaan atau mencederai,” jelas Togar panjang lebar.

“Maksudmu setiap anggota keluarga punya hak yang sama dan tidak boleh sewenang-wenang?” tanya Atep.

“Ya, tepat sekali, Tep,” jelas Togar.

Tindakan kekerasan dalam rumah tangga dan penganiayaan anak melanggar UU No. 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

“Kasihlah, ya, teman-teman. Anak-anak itu tidak seperti kita. Bisa sekolah dan bermain bebas,” kata Ida.

“Iya, sebenarnya mereka juga ingin bersekolah seperti kita,” tambah Togar.

“Bukankah sebenarnya setiap warga negara yang berumur 7 – 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar 9 tahun,” komentar Atep.

“Sebenarnya apa yang menjadi kendala sehingga mereka tidak bersekolah?” tanya Ida.

“Mungkin mereka terhambat masalah biaya, karena harus membantu orang tua, bekerja atau orang tua tidak mau menyekolahkan karena biaya sekolah mahal. Teman-teman, kita beruntung dapat sekolah. Makanya gunakan kesempatan ini untuk belajar dengan baik,” jawab Atep.

“Bukankah pemerintah sudah memberikan BOS (Biaya Operasional Sekolah)?” tanya Togar.

“Benar, namun semuanya kembali kepada pribadi masing-masing. Ada orang tua yang menginginkan anaknya sekolah, bahkan sampai ke jenjang tertinggi. Namun, ada juga yang tidak menginginkan anaknya bersekolah. Mereka memaksa anaknya membantu orang tuanya bekerja mencari nafkah,” lanjutnya.

“Jika ada orang tua yang melarang anaknya bersekolah apakah juga melanggar hukum?” tanya Togar.

“Benar, Gar. Hal itu melanggar UU No. 20 Tahun 2003 yang mengatur Sistem Pendidikan Nasional,” sahut Ida.



Sumber: *Ensiklopedia Umum untuk Pelajar, 2005*

Gambar 2.7 Reklame pajak.

“Lihatlah, teman-teman. Banyak gedung-gedung pemerintahan yang bagus, jalan-jalan sudah mulus, penerangan sudah terang benderang. Kalian tahu, tidak? Ini semua berkat uang rakyat,” Togar menjelaskan kepada temannya.

“Maksudmu, Gar?” tanya Atep bingung.

“Itu semua dibiayai oleh pajak dari masyarakat. Pajak berfungsi untuk membiayai pembangunan. *Malu dong, ketika kita kaya dan mampu, tapi tidak membayar pajak. Apa kata dunia?*” jelas Togar.

“Wah, kamu seperti iklan Duta Pajak Nasional, Gar,” kata Ida.

Perundangan tentang Pajak Nasional

1. UU No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. UU No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (PPh).
3. UU No. 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN).

Tujuan adanya Undang-undang Pajak Nasional

1. Meningkatkan sumber dana pemerintah untuk pembangunan.
2. Menggerakkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perpajakan.

2. Di Tingkat Daerah

Atep, Togar, dan Ida masih berdiskusi di taman. Diskusi mereka makin asyik.

“Teman-teman, saya kemarin ke supermarket bersama ibu. Ketika di supermarket, saya melihat ada laki-laki yang dibawa petugas ke kantor. Kalau tidak salah laki-laki itu merokok di dalam supermarket,” kata Togar.

“Togar, menghirup asap rokok saja berbahaya, apalagi yang merokok. Oleh karena itulah, pemerintah daerah peduli dengan kesehatan masyarakat dengan mengatur warganya dalam merokok, dan bukan melarangnya,” komentar Atep.

“Berarti merokok boleh, Atep?” tanya Ida.

“Sesungguhnya merokok itu tidak ada kebaikannya, karena kesehatan akan terganggu, dan keuangan juga boros. Namun, bagi warga yang masih ingin merokok, pemerintah daerah memberikan ruang tersendiri,” jawab Atep bijak.

“Di manakah warga dilarang merokok, Atep?” tanya Ida lagi.

“Di tempat umum, tempat ibadah, tempat belajar, tempat kerja bahkan di dalam angkutan umum. Semua warga harus patuh agar kualitas udara yang kita hirup jadi sehat dan segar,” jawab Atep.

Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta mulai mengatur warganya dalam hal merokok. Diharapkan warga mematuhi dan dapat mengurangi polusi udara yang sudah mengkhawatirkan. Peraturan ini dituangkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta No. 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok.

“Larangan merokok di DKI Jakarta merupakan contoh bentuk peraturan daerah. Tetapi saya masih bingung teman-teman. Siapakah yang berwenang membuat perda itu?” tanya Ida bingung.

“Lembaga-lembaga yang berwenang membuat Perda ialah:

- a. Di tingkat Provinsi, yaitu Gubernur dan DPRD provinsi.
- b. Di tingkat Kabupaten, Bupati dan DPRD kabupaten.
- c. Di tingkat Kota, Wali kota dan DPRD Kota.

Adapun tujuan pembuatan perda agar penyelenggaraan otonomi daerah dapat berjalan dengan baik,” jawab Togar.

“Teman-teman, bolehkah saya tambahkan?” pinta Atep.

“Boleh saja, Atep. Silahkan,” kata Togar mempersilahkan.

“Selain lembaga yang berwenang menetapkan perda bermacam-macam, peraturan perundang-undangnya pun juga bermacam-macam.

Berikut Peraturan Perundang-Undangan Daerah.

- a. Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi)
- b. Keputusan Gubernur/Kepala Daerah Provinsi
- c. Peraturan Daerah Tingkat kabupaten/kota
- d. Keputusan Bupati/Walikota/kepala Daerah Tingkat II
- e. Peraturan Desa (Perdes),” jelas Atep panjang lebar.

“Ada lagi, teman-teman. Ada contoh-contoh perda, misalnya perda tentang kebersihan kota. Kebersihan juga diatur di Kota Bandung dalam Perda Kota Bandung No. 23 Tahun 2005. Dalam Perda tersebut dilarang membuang sampah, kotoran, atau barang bekas lainnya di saluran air/selokan, jalan, trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum atau tempat lainnya yang mengganggu ketertiban, kebersihan, dan keindahan,” tambah Togar.

Contoh Perda

Provinsi	Kabupaten/ Kota	Dokumen	Tentang
Bali	Gianyar	Perda No. 7 Tahun 2000	Retribusi Izin Penebangan Kayu dan Bambu Rakyat
Banten	Serang	Perda No. 9 Tahun 2001	Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan
Banten	Tangerang	Perda No. 7 Tahun 2000	Pemerintah Desa
DI Aceh	Aceh Utara	SK Bupati No. 2 Tahun 1999	Ketentuan Pelaksanaan Perda Kab. Daerah Tingkat II Aceh Utara No. 8 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

Waktu sudah sore. Atep, Ida, dan Togar mengakhiri diskusi. Mereka beranjak dari taman menuju rumahnya masing-masing.



Uji-Wawasan

Kerjakan soal-soal berikut di buku tugasmu.

1. Apakah yang kalian ketahui tentang peraturan perundang-undangan di tingkat pusat?
2. Siapakah yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan di tingkat pusat?
3. Apakah yang kalian ketahui tentang peraturan daerah?
4. Siapakah yang berwenang membuat peraturan daerah?
5. Apakah tujuan dibuatnya perda?



Praktik Kerja

1. Wawancarailah salah seorang teman kalian. Tanyakan kepadanya beberapa hal di bawah ini dan catatlah tanggapannya.

No.	Permasalahan	Tanggapan
1.	Meskipun sudah dibuatkan peraturan/ undang-undang, tetapi masih banyak yang melakukan korupsi.	
2.	Apa yang harus dilakukan jika ada anak yang melanggar peraturan di sekolah atau di rumah?	

2. Berkunjunglah ke kantor kelurahan di tempat tinggal kalian. Coba tanyakan kepada kepala desa atau ketua BPD mengenai perdes yang sudah dibuat. Kemudian catatlah dan salinlah seperti tabel berikut di buku tugas.

No.	Perdes	Tentang
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		



Rangkuman

- Peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mempunyai sifat mengikat secara umum.
- Peraturan perundang-undangan dibagi menjadi dua, yaitu peraturan perundang-undangan pusat yang berlaku untuk semua warga negara dan peraturan perundang-undangan daerah yang berlaku untuk warga di daerah tersebut.
- Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menjelaskan bahwa negara Indonesia ialah negara yang berdasarkan hukum, sehingga segala sesuatu harus patuh kepada hukum.
- Tata urutan perundang-undangan di Indonesia ialah:
 - a. UUD 1945
 - b. Peraturan Pemerintah
 - c. Keputusan Presiden
 - d. Peraturan Daerah
- Peraturan Perundang-Undangn Pusat dibuat oleh DPR bersama presiden.
- Peraturan Perundang-Undangn Daerah Provinsi I dibuat oleh DPRD Provinsi bersama gubernur.
- Peraturan Perundang-Undangn Daerah Kabupaten dibuat oleh DPRD Kabupaten bersama bupati.
- Peraturan Perundang-Undangn Kota dibuat oleh DPRD Kota bersama Wali kota.
- Peraturan Desa dibuat oleh BPD bersama kepala desa.



Uji Kompetensi

Kerjakan soal-soal berikut ini di buku tugasmu.

A. Ayo, pilihlah jawaban yang benar.

1. Pernyataan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia
 - a. berbentuk republik
 - b. dikepalai seorang presiden
 - c. negara hukum
 - d. negara demokrasi

2. Peraturan perundang-undangan mempunyai sifat
 - a. memaksa
 - b. mengikat warga, kecuali pejabat negara
 - c. mengikat semua warga
 - d. mengikat pejabat negara dan keluarga
3. Peraturan perundang-undangan tertinggi di Indonesia dan tidak boleh ada peraturan di bawahnya yang bertentangan dengannya ialah
 - a. Pancasila
 - b. UUDS 1950
 - c. keputusan presiden
 - d. UUD 1945
4. Salah satu peran serta masyarakat dalam pembuatan perundang-undangan ialah
 - a. melakukan demonstrasi dengan turun ke jalan untuk mendukung undang-undang
 - b. mengevaluasi isi dan materi rancangan undang-undang
 - c. memberikan kritikan secara anarki
 - d. mengumpulkan tanda tangan untuk menolak undang-undang
5. Peraturan perundang-undangan dibuat dengan tujuan untuk
 - a. dipatuhi
 - b. menjamin kebebasan
 - c. menjaga ketertiban masyarakat
 - d. melindungi negara dari serangan musuh
6. Tahapan terakhir dalam pembuatan peraturan perundang-undangan ialah
 - a. mengajukan rancangan undang-undang
 - b. mengadakan dengar pendapat dengan badan legislatif
 - c. mensahkan peraturan
 - d. membuat rancangan undang-undang
7. Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami amandemen sebanyak

a. 6 kali	c. 4 kali
b. 5 kali	d. 8 kali
8. Berikut contoh perundang-undangan di tingkat pusat, *kecuali*
 - a. UU Lalu Lintas
 - b. UU Antikorupsi
 - c. UU Pajak
 - d. Perda Ketertiban Kota
9. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara merupakan salah satu tugas dari
 - a. Dirjen Pajak
 - b. KPK
 - c. BPK
 - d. Mahkamah Agung

10. Peraturan perundangan yang dibuat persiden dalam keadaan genting, memaksa, dan darurat adalah
 - a. instruksi presiden
 - b. keputusan presiden
 - c. peraturan pemerintah pengganti undang-undang
 - d. undang-undang
11. Berikut materi yang harus ada dalam membuat peraturan perundangan, *kecuali*
 - a. hak asasi manusia
 - b. kewajiban warga negara
 - c. pembagian wilayah
 - d. sosialisasi peraturan perundangan
12. Peraturan daerah disusun oleh DPRD dengan minta persetujuan
 - a. warga
 - b. camat
 - c. kepala desa
 - d. kepala daerah
13. Undang-undang dan peraturan yang dibentuk tidak boleh bertentangan dengan
 - a. undang-undang
 - b. peraturan pemerintah
 - c. APBN
 - d. UUD 1945
14. Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini tertuang dalam
 - a. Pasal 2 Ayat 1 UUD 1945
 - b. Pasal 2 Ayat 2 UUD 1945
 - c. Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945
 - d. Pasal 2 Ayat 2 UUD 1945
15. Hukum tertinggi sebagai dasar dalam peraturan perundang-undangan Indonesia adalah
 - a. Undang-Undang Dasar 1945
 - b. Undang-Undang
 - c. Peraturan Pemerintah
 - d. Ketetapan MPR
16. Undang-undang Dasar 1945 sebagai hukum....
 - a. adat
 - b. kebiasaan
 - c. dasar tertulis
 - d. tidak tertulis
17. Undang-Undang disahkan oleh
 - a. DPR
 - b. MPR
 - c. Kejaksaan tinggi
 - d. presiden
18. Peraturan pusat dibentuk oleh
 - a. pejabat setingkat menteri
 - b. presiden dan DPR
 - c. presiden dan menteri
 - d. DPD dan DPR

19. Undang-Undang Dasar 1945 memuat dasar dan garis besar hukum dalam
 - a. pengaturan ekonomi
 - b. penyelenggaraan negara
 - c. pembuatan RAPBN
 - d. pengaturan ketahanan negara
20. Peraturan daerah kota dibuat oleh
 - a. DPR dan bupati
 - b. DPRD kabupaten dan wali kota
 - c. DPRD dan gubernur
 - d. DPRD Provinsi dan Kabupaten bersama gubernur

B. Ayo, isilah titik-titik berikut dengan jawaban yang tepat di buku tugasmu.

1. Ketentuan yang mengatur pembentukan peraturan perundangan ialah
2. *UUD 1945 banyak mengalami amandemen*. Hal tersebut membuktikan bahwa UUD 1945 bersifat
3. Bagian dari UUD 1945 yang tidak mengalami amandemen ialah
4. Peraturan daerah kabupaten/kota dibentuk oleh
5. Peraturan pusat adalah peraturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga berwenang yang ada
6. Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut tercantum dalam
7. Lembaga-lembaga yang mempunyai kewenangan membuat peraturan daerah adalah
8. Peraturan perundang-undangan tingkat pusat, yaitu
9. Setiap undang-undang dan peraturan yang dibentuk tidak boleh bertentangan dengan
10. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum

C. Ayo, jawablah pertanyaan berikut dengan benar.

1. Jelaskan maksud bahwa Indonesia adalah negara hukum.
2. Apa fungsi peraturan perundang-undangan bagi warga negara?
3. Sebutkan hal-hal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan.
4. Jelaskan proses pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
5. Sebutkan contoh peraturan daerah yang kalian ketahui.

ULANGAN SEMESTER 1

Kerjakan soal-soal berikut di buku tugasmu.

A. Ayo, pilihlah jawaban yang benar.

Semoga menambah pemahaman materimu.

1. Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan tanggung jawab
 - a. segenap rakyat Indonesia
 - b. pemerintah
 - c. para pejabat pusat dan daerah
 - d. para pendiri bangsa
2. Setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia bertekad bersatu dalam satu wadah
 - a. Negara Republik Federal
 - b. Negara Republik Indonesia
 - c. Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - d. Negar Indonesia Bersatu
3. Seluruh rakyat Indonesia berkewajiban menjaga ... bangsa.
 - a. wilayah dan pulau
 - b. presiden dan menteri
 - c. persatuan dan kesatuan
 - d. perasaan dan keinginan
4. Berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan hadiah negara lain melainkan hasil
 - a. perjuangan pendiri bangsa
 - b. para pemuda yang memaksa untuk memproklamasikan kemerdekaan
 - c. perjuangan para pahlawan
 - d. perjuangan segenap rakyat Indonesia yang bersatu
5. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan
 - a. kedaulatan negara
 - b. perjuangan negara
 - c. sekelompok orang
 - d. sebagian wilayah negara
6. Lagu “Dari Sabang sampai Merauke” menggambarkan
 - a. indahnyanya negara Indonesia
 - b. kesatuan wilayah Indonesia
 - c. perjuangan para pahlawan
 - d. semangat para pemimpin
7. Kemerdekaan bangsa Indonesia selain berkat persatuan dan kesatuan bangsa juga berdasarkan
 - a. pemberian bangsa lain
 - b. bantuan negara lain
 - c. rahmat Tuhan Yang Maha Esa
 - d. rasa kasihan bangsa lain

8. Batas wilayah laut ZEE adalah
 - a. 10 mil
 - b. 12 mil
 - c. 150 mil
 - d. 200 mil
9. Ketahanan nasional merupakan kemampuan, kekuatan, dan daya tahan negara dalam menghadapi
 - a. ancaman dan gangguan
 - b. musuh negara
 - c. para penjajah
 - d. dampak kemerdekaan
10. Perintis adanya persatuan dan kesatuan dimulai dengan adanya organisasi
 - a. para pemuda
 - b. Budi Utomo
 - c. Tiga Serangkai
 - d. Empat Sekawan
11. Dewan Perwakilan Rakyat dapat menerima atau menolak peraturan pemerintah pengganti undang-undang dengan
 - a. mengadakan perubahan
 - b. menetapkan undang-undang
 - c. tidak mengadakan perubahan
 - d. mengganti undang-undang
12. Peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh menteri berkaitan dengan
 - a. ketetapan MPR
 - b. keputusan presiden
 - c. instruksi presiden
 - d. pelaksanaan tugas-tugas di departemennya
13. Peraturan daerah kabupaten/kota dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat daerah kabupaten/kota bersama
 - a. bupati/wali kota
 - b. gubernur
 - c. DPR
 - d. presiden
14. Di bawah ini peraturan perundang-undangan tingkat pusat adalah
 - a. UUD 1945
 - b. Proklamasi
 - c. Ketetapan MPR
 - d. Peraturan Pemerintah Pengganti UU

15. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2000 tentang
 - a. bumi dan bangunan
 - b. korupsi
 - c. pajak
 - d. lalu lintas
16. Berikut lembaga-lembaga yang berwenang membuat peraturan daerah, *kecuali*
 - a. DPRD
 - b. gubernur
 - c. bupati dan wali kota
 - d. DPR
17. Peraturan daerah adalah peraturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga berwenang yang ada di
 - a. daerah
 - b. pusat
 - c. kelurahan
 - d. kecamatan
18. Peraturan tentang korupsi terdapat dalam
 - a. Undang-Undang No. 21 Tahun 1997
 - b. Undang-Undang No. 31 Tahun 1997
 - c. Undang-Undang No. 20 Tahun 1997
 - d. Undang-Undang No. 30 Tahun 1997
19. Untuk pemberantasan korupsi, pemerintah telah mengeluarkan UU No. 30 Tahun 2002 tentang
 - a. Komisi Hak Asasi Manusia
 - b. Komisi Independen
 - c. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - d. Komisi Pemilu
20. Peraturan perundang-undangan di masyarakat seringkali masih belum sepenuhnya dilaksanakan, hal tersebut dikarenakan
 - a. tidak cocok dengan peraturan tersebut
 - b. hanya dipergunakan sebagian orang saja
 - c. merugikan banyak orang
 - d. kurangnya kesadaran masyarakat
21. Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban memberikan perlindungan terhadap
 - a. saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan terjadinya tindak pidana korupsi
 - b. tersangka tindak pidana korupsi
 - c. petugas tindak pidana korupsi
 - d. pengadilan tindak pidana korupsi

22. Setiap orang, organisasi, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat yang telah berjasa dalam usaha membantu upaya pencegahan atau pemberantasan tindak pidana korupsi berhak mendapat
 - a. royalti
 - b. penghargaan
 - c. penghormatan
 - d. santunan
23. Peraturan negara/pusat harus ditaati dan dilaksanakan oleh
 - a. golongan tertentu
 - b. provinsi tertentu
 - c. seluruh rakyat
 - d. seluruh pejabat
24. Dalam melaksanakan peraturan diperlukan kesadaran diri masing-masing dan
 - a. kerja sama antarwarga
 - b. kalangan pejabat
 - c. penegak hukum
 - d. anggota DPR
25. Lembaga yang mengesahkan undang-undang adalah
 - a. DPR
 - b. presiden
 - c. DPD
 - d. dewan menteri
26. Peraturan daerah dibuat untuk mengatur penyelenggaraan
 - a. pemerintah pusat
 - b. pemerintah daerah
 - c. pemerintah yang bersatu
 - d. pemerintah yang sah
27. Yang menetapkan UUD 1945 adalah
 - a. MPR
 - b. presiden
 - c. PPKI
 - d. DPR
28. Peraturan pemerintah dibuat untuk
 - a. mempertahankan jabatan presiden
 - b. memperpanjang masa jabatan presiden
 - c. memperlancar jalannya pemerintahan
 - d. melaksanakan perintah undang-undang
29. Keputusan presiden bersifat
 - a. mengatur peraturan
 - b. menetapkan peraturan
 - c. memperingan peraturan
 - d. memperlancar peraturan

30. Kandungan isi Sumpah Pemuda adalah
- pernyataan bersatu dalam negara Indonesia
 - pernyataan satu bangsa, tanah air, dan bahasa Indonesia
 - pernyataan kemerdekaan Indonesia
 - pernyataan satu kehendak

31.



Gambar di samping berasal dari Suku

- Jawa
- Bali
- Irian
- Dayak

32.



Gambar di samping berasal dari Suku

- Jawa
- Bali
- Irian
- Dayak

33.



Gambar di samping berasal dari Suku

- Dayak
- Jawa
- Bali
- Irian

34. Ikut ronda malam di kampung berarti menaati peraturan
- sekolah
 - masyarakat
 - rumah
 - negara
35. Membersihkan kamar sendiri merupakan contoh peraturan
- sekolah
 - masyarakat
 - rumah
 - negara
36. Pakaian harus dimasukkan dan memakai sabuk adalah contoh peraturan
- masyarakat
 - rumah
 - negara
 - sekolah

37. “Wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang dengan tidak mendasarkan pada adanya surat ketetapan pajak” adalah bunyi
- Undang-Undang No. 21 Tahun 1997
 - Undang-Undang No. 31 Tahun 1999
 - Undang-Undang No. 20 Tahun 2000
 - Undang-Undang No. 30 Tahun 2002
38. Perilaku masyarakat Indonesia harus bercermin pada
- hati nurani
 - Pancasila
 - tap MPR
 - peraturan pemerintah
39. Suatu kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa itu sendiri, yang diyakini kebenarannya dan menimbulkan tekad pada bangsa untuk mewujudkannya. Hal tersebut berarti Pancasila sebagai
- ideologi negara
 - dasar negara
 - pandangan hidup bangsa
 - filsafat negara
40. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, maka bangsa Indonesia akan
- aman
 - damai
 - sentosa
 - bersatu

B. Ayo, isilah titik-titik berikut dengan jawaban yang tepat di buku tugasmu.

- Batas laut teritorial Indonesia dari titik terluar sebuah pulau ke laut bebas adalah
- Budi Utomo adalah organisasi modern yang pertama lahir di
- Lahirnya persatuan dan kesatuan bangsa ditandai dengan adanya
- Angkatan 45 juga disebut
- Ancaman terhadap sebagian wilayah Indonesia merupakan ancaman terhadap
- Dalam kehidupan sehari-hari kita harus hidup
- Pekerjaan yang berat akan terasa ringan jika dikerjakan secara

8. Persatuan dan kesatuan merupakan syarat mutlak terwujudnya
9. Masyarakat harus selalu menjaga ketahanan fisik maupun ketahanan jiwa agar terhindar dari
10. Untuk mewujudkan ketertiban, keteraturan, dan ketenteraman masyarakat Indonesia segala sesuatu harus berdasarkan dan tunduk pada
11. Hukum tertinggi yang menjadi dasar dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah
12. Setiap undang-undang dan peraturan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan
13. Undang-Undang Dasar 1945 adalah bentuk peraturan perundangan yang tertinggi sebagai hukum
14. Undang-undang Dasar 1945 memuat dasar dan garis besar hukum dalam
15. Peraturan perundang-undangan di dalam masyarakat seringkali masih belum sepenuhnya dilaksanakan. Hal tersebut dikarenakan

C. Ayo, jawablah soal berikut dengan tepat.

1. Bagaimanakah letak astronomi wilayah Indonesia?
2. Berapakah batas wilayah kedaulatan dirgantara yang termasuk orbit geostasioner berdasarkan UU No. 20 Tahun 1982?
3. Apakah yang dimaksud keputusan menteri dan instruksi menteri?
4. Jelaskan cara menetapkan rancangan peraturan atau undang-undang.
5. Diatur di manakah peraturan lalu lintas?

Bab 3

Memahami Kebebasan Berorganisasi



Satu kebaikan yang ditata dengan baik sesungguhnya mampu mengalahkan banyak kejahatan yang tidak teratur. Namun, sebaliknya satu kejahatan yang teratur dan rapi akan mampu mengalahkan banyak

kebaikan yang tidak ditata rapi. Untuk itulah kita butuh berorganisasi agar kebaikan yang menjadi tujuan hidup pribadi dan masyarakat dapat tercapai.



Tujuan Pembelajaran

Tujuan pembelajaranmu pada bab ini adalah:

- ❖ mampu mendefinisikan pengertian organisasi dengan benar;
- ❖ mampu menyebutkan manfaat berorganisasi sesuai manfaatnya;
- ❖ mampu menyebutkan contoh-contoh organisasi di lingkungan sekolah/masyarakat;
- ❖ mampu berperan aktif dalam memilih organisasi di sekolah.

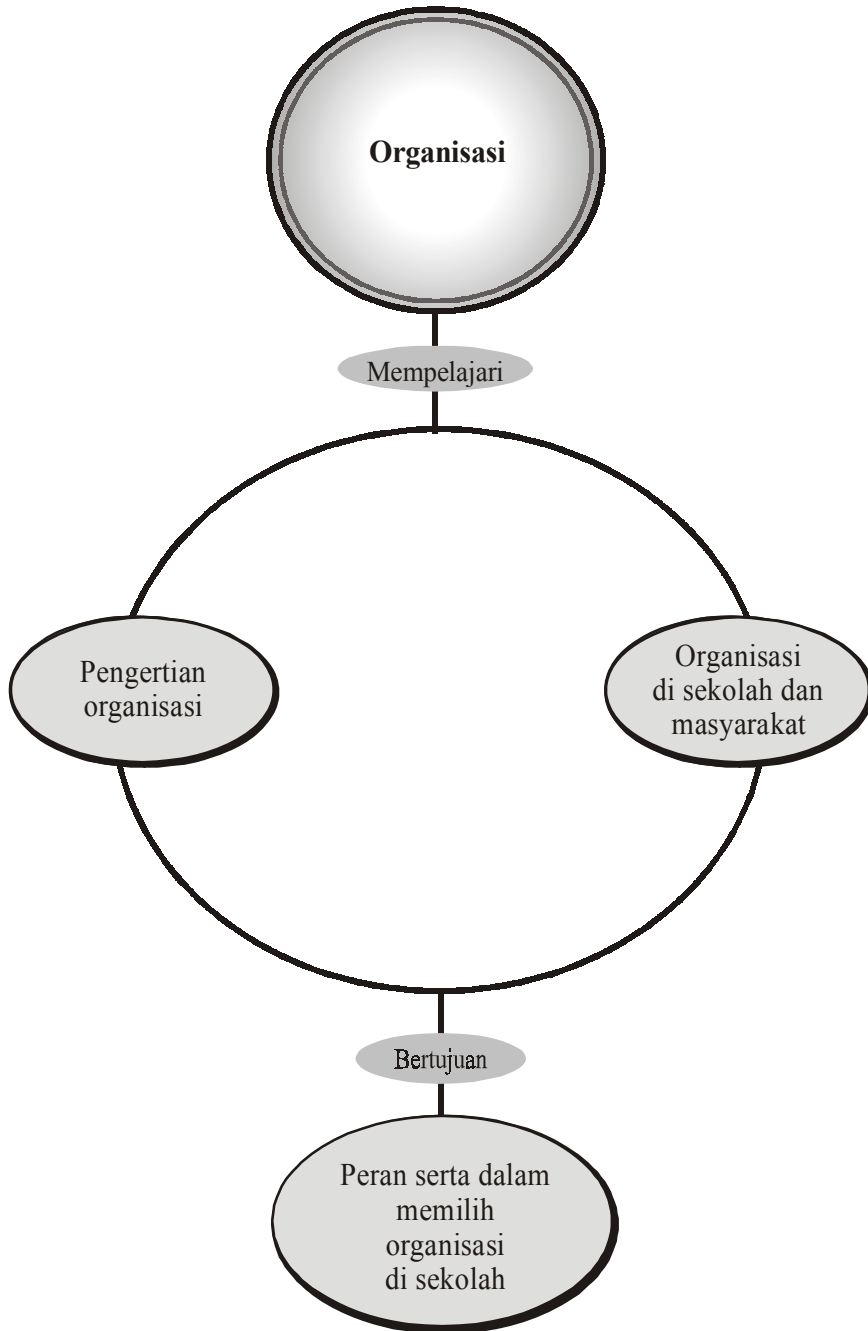


Kata Kunci

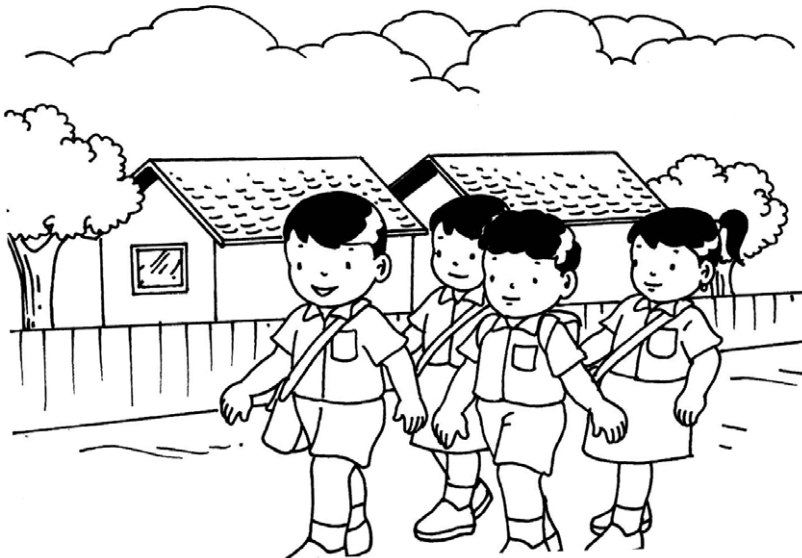
- ❖ organisasi
- ❖ anggota
- ❖ pengurus



Peta Konsep



A. Pengertian Organisasi



Gambar 3.1 Anak-anak melakukan baris berbaris

Siang itu Togar sedang bercakap-cakap dengan pamannya. Togar sangat bingung karena dirinya diminta Pak Darma menjadi komandan peleton pasukan baris berbaris.

“Paman, sebenarnya saya ragu-ragu. Apa saya bisa menjadi komandan peleton?” tanya Togar gelisah.

“Togar, kamu sudah diberi amanah, sebaiknya jangan ditolak,” tegas Pamannya.

“Bukan ditolak, Paman, tapi saya pesimis. Saya khawatir jika tidak menjadi juara, Paman,” jawab Togar lagi.

“Yang terpenting kamu kerjakan sebaik mungkin tugasmu menjadi komandan. Menjadi komandan pasukan baris berbaris sebagai latihan bagimu dalam berorganisasi,” kata Paman.

“Apakah organisasi itu, Paman?” tanya Togar.

Sesaat Paman terdiam. Beliau akhirnya bercerita mengenai organisasi. Berikut ceritanya.

Di sebuah kampung tinggal sebuah keluarga. Keluarga Pak Johan mempunyai 1 orang putri, namanya Ita. Pak Johan adalah seorang guru, sedangkan istrinya ibu rumah tangga.

Keluarga ini ingin memiliki sebuah keluarga yang baik, harmonis, demokratis, dan penuh kasih sayang antarpenghuninya.

Agar tujuan tercapai, maka selaku kepala keluarga, Pak Johan dan istrinya merencanakan kegiatan-kegiatan serta membagi tugas di rumah bahkan menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan dan demokratis.



Gambar 3.2 Sebuah keluarga harmonis dengan pekerjaan masing-masing di rumah

“Nah, Togar, seperti itulah gambaran sebuah organisasi,” terang Paman.

“Jadi, organisasi itu seperti sebuah wadah atau tempat kerja sama bagi orang-orang ya, Paman?” tanya Togar.

“Benar, sekali. Organisasi adalah sebuah perkumpulan antara 2 orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan,” jawab Paman.

“Lalu, mengapa harus terdiri dari orang-orang? Apakah kita tidak bisa sendiri, Paman?” tanya Togar penasaran.

“Wah, pertanyaanmu seperti wartawan saja. Mengapa kita perlu berorganisasi? Coba dengarkan baik-baik,” kata Paman.

Mengapa kita perlu berorganisasi?

1. Manusia adalah makhluk sosial, artinya tidak dapat hidup sendiri dan pasti memerlukan orang lain.
2. Manusia mempunyai keterbatasan dari segi waktu, tenaga, gerak, dan pikiran dalam memenuhi kebutuhannya. Artinya dengan keterbatasan itu kita memerlukan orang lain untuk mencapai tujuan.
3. Kebutuhan manusia beragam, sehingga kita perlu berkumpul dengan orang lain yang mempunyai kebutuhan/tujuan yang sama dengan kita.

Keesokan harinya, Togar pergi ke sekolah. Togar bersama anak-anak kelas 5 lainnya siap mengikuti pelajaran. Pagi itu Pak Darma mengajar kelas 5. Beliau menjelaskan mengenai organisasi.

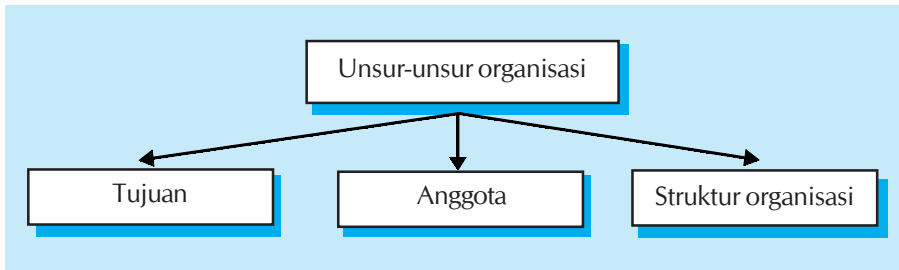
“Anak-anak, seperti kita tahu bahwa bentuk dan tujuan organisasi banyak sekali. Akan tetapi setiap organisasi pasti memiliki unsur-unsur. Coba, sebutkan unsur-unsur tersebut,” pinta Pak Darma.

“Memiliki anggota yang terdiri dari orang-orang, Pak,” jawab Atep.

“Memiliki tujuan, Pak,” seru Ida.

“Memiliki struktur yang mengatur perilaku anggotanya,” jawab Togar tak mau ketinggalan.

“Bagus, anak-anak. Kalian memang anak-anak pintar,” puji Pak Darma.



“Anak-anak, perlu kalian ketahui di zaman kemerdekaan seperti sekarang ini, setiap orang boleh mengemukakan pendapat dan gagasannya. Bahkan kebebasan berorganisasi telah diatur dalam undang-undang,” terang Pak Darma.

Kebebasan berorganisasi di Indonesia diatur dalam UUD 1945 Pasal 28E ayat (3) yang berbunyi

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

1. Tujuan Organisasi

“Bagaimana cara menentukan tujuan organisasi, Pak?” tanya Togar.

“Setiap bentuk organisasi mempunyai tujuan sendiri yang disepakati berdasarkan kebutuhan dan kepentingan anggotanya. Tujuan ini ditentukan oleh anggotanya. Ada bermacam-macam jenis organisasi yang didasarkan pada bidang tujuannya,” jawab Pak Darma.

Jenis organisasi berdasar bidang tujuan, antara lain:

1. organisasi ekonomi;
2. organisasi sosial;
3. organisasi seni dan budaya;
4. organisasi olahraga;
5. organisasi politik.

“Apakah pemerintah juga memiliki organisasi seperti ekonomi, sosial, dan lainnya?” tanya Ida.

“Tentu saja, Ida, tetapi berbentuk lembaga pemerintahan dan departemen. Contohnya Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Sosial,” jelas Atep membantu Ida.

“Benar, anak-anak. Bahkan sekarang ini banyak sekali organisasi independen yang membantu pemerintah mencapai tujuannya seperti KPK, KPU, dan lain-lain,” tambah Pak Darma.

2. Anggota

“Pak, saya masih belum paham. Apakah anak seusia kami juga boleh menjadi anggota organisasi?” tanya Togar.

“Ya, tentu saja boleh. Misalnya menjadi anggota koperasi atau organisasi tim sepak bola, dan lain-lain. Organisasi yang kalian pilih sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Contohnya, koperasi sekolah yang anggotanya anak-anak sekolah.

Menjadi anggota organisasi syaratnya sangat mudah, yaitu mau mematuhi peraturan dan tata tertib organisasi. Selain itu, juga mau melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan peran dan statusnya,” jawab Pak Darma panjang lebar.

“Oh, begitu, ya Pak,” kata Togar sambil mengangguk-angguk.

3. Struktur Organisasi

Pak Darma melanjutkan penjelasannya. Anak-anak serius mengikuti penjelasan Pak Darma dengan sesekali bertanya.

“Setiap organisasi pasti mempunyai struktur organisasi,” kata Pak Darma.

“Contohnya apa, Pak?” tanya Atep.

“Misalnya kepengurusan, pembagian kerjanya, tata tertibnya, dan kebijaksanaannya. Struktur kepengurusan masing-masing organisasi berbeda-beda. Misalnya perbedaan struktur antara organisasi sekolah dengan tiap-tiap kelas. Di setiap organisasi pasti ada yang menjadi pemimpin. Tetapi pemimpin itu juga memerlukan bantuan orang lain untuk mencapai tujuannya,” jelas Pak Darma.

“Tapi, bagaimana dengan pembagian tugasnya, Pak? Apakah pemimpin juga harus ikut bekerja?” tanya Ida.

“Masing-masing unsur dalam organisasi harus sama-sama bekerja dan saling membantu, baik itu pengurus, anggota, atau bahkan ketuanya sekali pun. Dalam bekerja menjalankan tugasnya disesuaikan dengan statusnya, misalnya sebagai ketua bertugas mengatur dan bertanggung jawab terhadap jalannya organisasi. Agar organisasi dapat berlangsung baik dan pengurusnya bekerja dengan baik, maka diperlukan tata-tertib atau peraturan,” jelas Pak Darma.

“Pak, bagaimana dengan sekretaris? Apakah juga seperti ketua?” tanya Atep.

“Sekretaris adalah jabatan dalam sebuah organisasi. Di mana ada ketua, di sana ada sekretaris. Mengapa demikian? Karena seorang sekretaris adalah pembantu ketua. Sekretaris mengurus surat menyurat dan administrasi,” jawab Pak Darma.

“Pak, saya adalah bendahara kelas. Apa tugas saya? Apa tugas saya berhubungan dengan uang terus?” sela Ida.

“Tugas bendahara berhubungan dengan uang. Makanya kamu harus jujur, ya. Bendahara mencatat uang masuk dan uang keluar,” jawab Pak Darma.

“Bagaimanakah proses pemilihan ketua dan pengurus, Pak?” tanya Togar.

“Pengurus organisasi dipilih oleh anggota dan setiap anggota berhak dipilih dan mempunyai kewajiban memilih. Bagaimana caranya memilih pengurus organisasi?”

1. Pemilihan

Sebelum diadakan pemilihan akan diajukan beberapa calon pengurus. Calon-calon ini akan berkampanye mempromosikan diri mereka sendiri agar dipilih.

Mereka berkampanye tentang program/hal-hal yang akan dilakukan jika terpilih menjadi pengurus. Hal-hal yang perlu dihindari ketika berkampanye ialah berbohong terhadap programnya, menjelek-jelekkkan calon lain bahkan *money politic*/suap.

Para calon harus jujur dan benar-benar mempunyai rasa ikhlas dalam menjadi pengurus.

2. Aklamasi/penunjukan langsung

Cara ini dilakukan ketika anggota sudah sepakat mengangkat seseorang tanpa proses pemilihan melainkan ditunjuk, dan yang ditunjuk tidak keberatan dengan amanah/jabatannya,” jelas Pak Darma.



Uji-Wawasan

1. Buatlah kelompok yang beranggotakan 3 orang. Carilah contoh-contoh organisasi berdasar bentuk tujuannya. Carilah sebanyak-banyaknya.

No.	Bidang Tujuan Organisasi	Contoh-contoh Organisasi

2. Perhatikan cerita berikut

Anwar adalah ketua kelas 5F SD Harapan Bangsa. Meski sebagai ketua, kelas Anwar masih sering tidak disiplin baik dalam belajar atau bergaul. Tanpa disadari Anwar pun menjadi ikut-ikutan meniru segala perilaku temannya. Sementara Disti, Ria, Joni, dan Herman tidak bisa berbuat banyak untuk mengingatkan Anwar. Diskusikan:

- a. Tentang perilaku Anwar.
- b. Tentang tanggung jawab Anwar sebagai ketua.
- c. Tentang langkah-langkah yang harus diambil teman-teman pengurus.
- d. Kesimpulan kasus di atas.

B. Organisasi di Sekolah dan Masyarakat

1. Organisasi di Sekolah

“Togar, coba siapa yang mempunyai wewenang mengatur sekolah kita?” tanya Pak Darma.

“Tentu saja Pak Rudi, Pak. Beliau selaku kepala sekolah,” jawab Togar mantap.

“Coba, kamu Ida. Siapa saja yang disebut anggota organisasi di sekolah kita?” tanya Pak Darma sambil mendekati Ida.

“Semua warga sekolah, Pak. Ada siswa, guru, penjaga sekolah, TU, petugas kebersihan, serta karyawan lainnya,” jawab Ida.

“Bagus, tetapi di sekolah kita juga ada organisasi yang lain. Siapa yang dapat menyebutkan?” tanya Pak Darma.

“Ada pramuka, koperasi sekolah, dan koperasi guru, Pak,” jawab Togar.

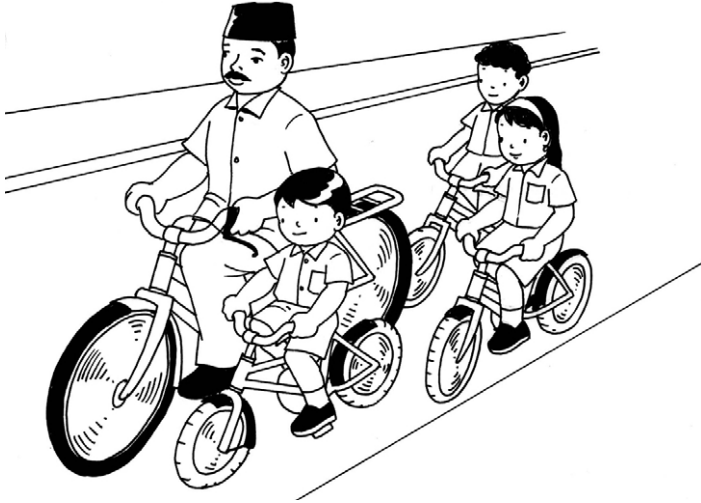
“Benar sekali. Coba Bapak tambahkan. Di sekolah juga ada organisasi PMR, OSIS, ekstrakurikuler olahraga dan seni, serta PKS,” tambah Pak Darma mengakhiri pelajaran.



Gambar 3.3 Koperasi sekolah.

2. Organisasi di Masyarakat

Setelah pulang sekolah, Pak Darma mengajak bersepeda Ida, Togar, dan Atep ke rumahnya. Mereka ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut lagi mengenai organisasi di masyarakat.



Gambar 3.4 Pak Darma bersepeda bersama Ida, Togar, dan Atep.

Setiba di rumah Pak Darma, mereka tidak mendapati siapa pun. Menurut tetangganya, Bu Darma sedang ada pertemuan PKK di Kelurahan. Bu Darma adalah ketua PKK. PKK singkatan dari Pembinaan Kesejahteraan Keluarga. Akhirnya mereka menunggu sampai Bu Darma kembali ke rumahnya.

“Selamat siang, Bu,” kata mereka serempak.

“Selamat siang, anak-anak. Wah, Ibu kedatangan tamu penting,” kata Bu Darma.

Setelah dipersilakan masuk dan beristirahat, mereka memberanikan diri bertanya kepada Bu Darma.

“Maaf, Bu. Kedatangan kami ke sini sesungguhnya ingin menanyakan masalah organisasi di masyarakat,” kata Ida.

“Organisasi masyarakat didirikan karena kita hidup di lingkungan masyarakat. Kita bagian dari masyarakat, maka kita perlu berhubungan dengan mereka,” jawab Bu Darma.

“Maksudnya apa, Bu?” tanya Atep.

“Untuk berhubungan dan berkomunikasi tersebut, kita perlu wadah/tempat yang disebut organisasi,” jawab Bu Darma singkat.

“Apakah organisasi masyarakat juga memerlukan peraturan, Bu?” tanya Togar.

“Tepat sekali. Karena dengan peraturan atau tata tertib, maka jalannya organisasi akan lebih teratur, sehingga tujuan organisasi pun dapat tercapai,” jelas Bu Darma.

“Contohnya apa saja, Bu?” tanya Ida.

“Banyak sekali organisasi di masyarakat.

a. *Karang Taruna*

Karang taruna merupakan organisasi sebagai wadah kegiatan para pemuda. Adapun kegiatannya meliputi kerja bakti membersihkan lingkungan, menggelar pelatihan, perlombaan olahraga, kesenian, dan lain-lain. Juga untuk membina dan membimbing pemuda dan remaja.

b. *PKK*

PKK merupakan wadah kegiatan ibu-ibu. Kegiatannya lebih banyak di bidang sosial masyarakat, seperti melaksanakan peningkatan gizi masyarakat melalui posyandu, melatih ibu-ibu dan pemudi memasak, menjahit, dan lain-lain.

c. *RT dan RW*

RT singkatan dari Rukun Tetangga. Adapun RW singkatan dari Rukun Warga. Keduanya termasuk organisasi atau lembaga pemerintah. Adapun tugas dan kegiatannya melayani masyarakat berkaitan dengan administrasi pemerintahan, seperti pengurusan KTP, Pajak Bumi dan Bangunan, dan lain-lain. Selain itu, RT dan RW bertugas mengatur masyarakat agar tercipta kehidupan yang aman, tenteram, dan nyaman.

Demikian anak-anak, sebenarnya masih banyak lagi contohnya. Coba kalian amati dan sebutkan sendiri, ya,” jelas Bu Darma.

“Terima kasih, Bu,” jawab anak-anak serempak.

Setelah mendapat penjelasan, Atep, Togar, dan Ida pulang ke rumah masing-masing.



Uji Wawasan

Coba sebutkan organisasi sekolah di tempat kalian belajar. Kemudian ceritakan tentang struktur kepengurusan dan jenis-jenis kegiatannya.

C. Peran Serta Memilih Organisasi di Sekolah

Pak Darma membagikan formulir pendaftaran organisasi sekolah. Ada banyak macam organisasi yang bisa dipilih siswa. Ada tim dokter kecil, mading (majalah dinding), tim melukis, dan lain-lain. Anak-anak diminta menentukan pilihan sesuai dengan bakat, minat, dan cita-cita. Anak-anak diberi waktu satu hari untuk mempertimbangkan pilihannya.

Togar membawa pulang formulirnya. Tapi sesampainya di rumah, wajahnya agak murung. Dengan wajah cemberut, Togar meletakkan tasnya di meja. Ibunya yang melihat gelagat kurang baik, segera menghampirinya.

“Ada apa, sayang? Kenapa kamu murung?” tanya ibunya.

“Saya sedikit kecewa, Bu,” jawab Toga.

“Memangnya ada apa, Togar?” tanya ibunya lagi.

“Togar ingin jadi dokter, makanya Togar masuk tim dokter kecil dalam organisasi UKS (Usaha Kesehatan Sekolah). Tetapi ternyata, teman-teman sekelas tidak ada yang menjadi dokter kecil,” jawab Togar panjang lebar.

“Lho, bagus sekali. Jadi, masalahnya apa?” tanya ibunya lagi.

“Masalahnya, Togar tidak punya teman jika ada latihan dokter kecil,” jawab Togar.

Akhirnya ibunya tahu bahwa Togar masuk menjadi dokter kecil, tetapi belum yakin dengan pilihannya karena tidak ada teman untuk latihan.

“Togar, dalam memilih organisasi harus kamu pertimbangkan sungguh-sungguh, terutama kesesuaian dengan bakat, minat, dan cita-citamu. Jika kamu sudah menentukan pilihan, kamu harus yakin, kamu harus bersemangat dan tidak boleh menyesali pilihanmu,” nasihat Ibu Togar.

Di lain pihak, Ida masih terlihat ragu-ragu menentukan pilihannya. Ida tahu bahwa dirinya tidak mahir dalam melukis. Ia juga menyadari bahwa minatnya lebih ke jurnalistik/tulis menulis akhirnya ia pun bergabung dengan tim Mading (Majalah Dinding) Sekolah.

“Atep, kamu sudah mengumpulkan formulir pilihan kegiatan?” tanya Ida.

“Belum, Ida. Apakah kamu sudah mengumpulkan?” tanya Atep balik.

“Ida, bagaimana jika kita ikut melukis saja. Selain kita bisa pandai menggambar, nanti juga bisa menjadi pelukis terkenal,” kata Atep.

“Iya, Tep. Tapi saya ...” jawab Ida ragu-ragu.

“Sudahlah, Ida. Pokoknya kamu ikut melukis saja. Nanti kita bisa pulang bersama-sama. Mana formulirmu, biar saya kumpulkan kepada Pak Darma,” kata Atep.

Dengan pertimbangan yang terkesan tidak matang, semua anak mengumpulkan formulir kepada Pak Darma.

“Anak-anak, jika Bapak cermati, ternyata pilihan kegiatan kalian belum dipertimbangkan secara matang. Semuanya masih dipengaruhi oleh teman, dan bukan berasal dari hati dan pilihan kalian sendiri. Dalam memilih hendaknya kalian perhatikan juga cita-cita dan bakat kalian. Jangan sekedar ikut-ikutan teman atau dipaksa orang lain. Karena nantinya pilihan kalian tidak akan berjalan dan berkembang dengan baik, kalian juga akan menyesal nantinya,” nasihat Pak Darma.



Uji Wawasan

Made dan Butet tidak mengikuti satu pun organisasi sekolah. Mereka merasa tidak memiliki kemampuan apa pun sehingga kebingungan dalam menentukan pilihan.

Sekarang coba kalian diskusikan:

- Tentang sikap Made dan Butet.
- Bagaimanakah seharusnya sikap orang tuanya?
- Bagaimanakah seharusnya sikapmu sebagai teman?



Praktik Kerja

Buatlah sebuah kelompok beranggotakan 2 orang. Tanyakan kepada para warga sekolah mengenai tugas mereka masing-masing. Jangan lupa kalian harus sopan dalam bertanya.

No.	Warga Sekolah	Tugas



Rangkuman

- Organisasi ialah sebuah tempat/wadah berkumpulnya 2 orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.
- Unsur organisasi terdiri atas anggota, tujuan, dan struktur organisasi.
- Agar organisasi berjalan baik dibutuhkan pengurus organisasi.
- Contoh organisasi di sekolah ialah OSIS, PMR, ekstrakurikuler, UKS, dan lain-lain.
- Contoh organisasi di masyarakat ialah RT, RW, Posyandu, PKK, dan lain-lain.



Uji Kompetensi

Kerjakan soal-soal berikut di buku tugasmu.

I. Ayo, pilihlah jawaban yang benar.

1. Pengertian organisasi ialah
 - a. dua orang yang melakukan kegiatan demi mencapai cita-cita
 - b. perkumpulan orang yang mempunyai kegiatan untuk mencapai tujuan
 - c. sekumpulan orang yang saling berdebat dalam menentukan tujuan
 - d. dua orang atau lebih yang bekerja sama dan saling berbagi keuntungan
2. Pasal 28 E ayat 3 UUD 1945 mengatur tentang
 - a. kebebasan mengkritik orang lain
 - b. kebebasan berserikat untuk merugikan negara
 - c. kebebasan mengeluarkan pendapat
 - d. kebebasan memilih organisasi yang akan diikuti
3. Manusia berorganisasi dikarenakan manusia mempunyai
 - a. kebebasan dalam hidupnya
 - b. keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan
 - c. beban berat dalam hidupnya
 - d. sifat sosial
4. Contoh organisasi kemasyarakatan di desa ialah
 - a. siskamling
 - b. puskesmas
 - c. RW
 - d. RT

5. Kebutuhan manusia dalam berorganisasi untuk mencapai
 - a. cita-cita para anggotanya
 - b. tujuan yang ditetapkan ketua
 - c. keuntungan sebanyak-banyaknya
 - d. tujuan yang ditetapkan bersama
6. Ibu Raihana mempunyai seorang balita berumur 8 bulan. Organisasi yang tepat yang harus diikuti Ibu Raihana ialah
 - a. PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga)
 - b. arisan ibu-ibu RW
 - c. Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu)
 - d. PMI (Palang Merah Indonesia)
7. Anggota organisasi di sekolah ialah
 - a. siswa yang mengikuti
 - b. guru
 - c. semua warga sekolah
 - d. guru dan siswa
8. Berikut alasan memilih organisasi, *kecuali*
 - a. bakat
 - b. waktu
 - c. minat
 - d. biaya
9. Berikut tugas sekretaris organisasi, *kecuali*
 - a. memimpin dan mengagendakan rapat
 - b. bersama pengurus lain membuat agenda
 - c. mengarsip berkas dan agenda kerja
 - d. memimpin demonstrasi
10. Cara pembentukan pengurus organisasi dengan memberi kesempatan berkampanye terlebih dahulu di hadapan pemilih disebut
 - a. interupsi
 - b. pemilihan
 - c. aklamasi
 - d. diplomasi
11. Salah satu manfaat mengikuti organisasi ialah
 - a. disiplin dan berlatih bekerja sama
 - b. memiliki banyak kesempatan bertemu orang lain
 - c. dapat menyalurkan bakat berbicara seseorang
 - d. memberikan keuntungan bagi dirinya sendiri
12. Organisasi nonpemerintah yang bergerak di bidang sosial ialah
 - a. Departemen Pendidikan Nasional
 - b. yayasan
 - c. Komisi Pemilihan Umum
 - d. Bank Indonesia

13. PGRI, IDI, dan koperasi petani adalah contoh organisasi berdasarkan
 - a. jabatan
 - b. profesi
 - c. penghasilan
 - d. tingkat pendidikan
14. Gelar Bapak Koperasi Indonesia diberikan kepada
 - a. Bung Tomo
 - b. Bung Karno
 - c. Bung Thamrin
 - d. Bung Hatta
15. Wayan ingin menjadi anak yang mandiri, disiplin, dan mempunyai jiwa kepemimpinan, maka Wayan masuk organisasi sekolah
 - a. polisi kecil
 - b. dokter kecil
 - c. PMR
 - d. pramuka
16. Berikut ini unsur-unsur organisasi adalah
 - a. tujuan, anggota, dan struktur organisasi
 - b. anggota, ketua, dan sekretaris
 - c. tujuan, ketua, dan anggota
 - d. ketua, tujuan, dan sekretaris
17. Organisasi bersifat
 - a. keharusan
 - b. kemauan
 - c. sukarela
 - d. paksaan
18. Organisasi kepemudaan salah satunya adalah
 - a. PKK
 - b. Dasa wisma
 - c. OSIS
 - d. Karang taruna
19. Organisasi para siswa di sekolah adalah
 - a. Pramuka
 - b. Karang Taruna
 - c. OSIS
 - d. PMI
20. Karang taruna merupakan organisasi yang berskala
 - a. besar
 - b. menengah
 - c. modern
 - d. elit

B. Ayo, isilah titik-titik berikut dengan tepat di buku tugasmu.

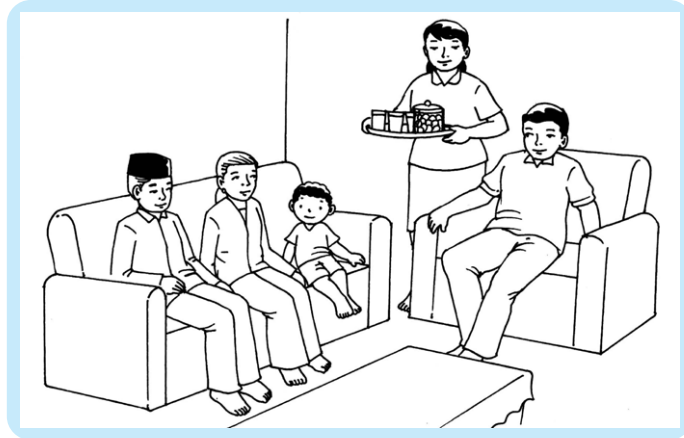
1. Kebebasan berpendapat merupakan ... setiap warga Indonesia.
2. Peraturan/tata tertib dibuat organisasi agar kegiatan sesuai dengan
3. Organisasi bagi kaum perempuan di tingkat desa ialah
4. Organisasi bagi pemuda di tingkat desa ialah
5. Unsur-unsur organisasi meliputi
6. PDIP dan Golkar merupakan contoh organisasi
7. Jalannya organisasi diatur oleh
8. Tugas sekretaris dalam organisasi adalah
9. Agar jalannya organisasi berjalan baik, maka diperlukan
10. Para pemuda di kampung berkumpul dalam organisasi

C. Ayo, jawablah pertanyaan berikut dengan benar.

1. Jelaskan pengertian organisasi.
2. Mengapa manusia memerlukan organisasi dalam bentuk apapun?
3. Sebutkan 3 unsur dalam organisasi.
4. Berilah contoh organisasi di sekolah dan masyarakatmu masing-masing.
5. Jelaskan 2 cara dalam memilih pengurus organisasi.

Bab 4

Keputusan Bersama



Pernahkah kalian mengikuti rapat keluarga?
Apa saja yang dibicarakan? Pasti untuk menentukan peraturan keluarga, bukan?
Pernahkah kalian mengikuti pemilihan ketua kelas?

Apa saja kegiatan dalam pemilihan ketua kelas?

Pastinya ada kegiatan yang menghasilkan keputusan bersama, Baik itu secara musyawarah, mufakat, aklamasi, maupun *votting*.



Tujuan Pembelajaran

Tujuan pembelajaranmu pada bab ini adalah:

- ❖ mampu mengetahui bentuk-bentuk keputusan bersama dengan benar;
- ❖ mampu mengetahui cara-cara mematuhi keputusan bersama dengan benar.

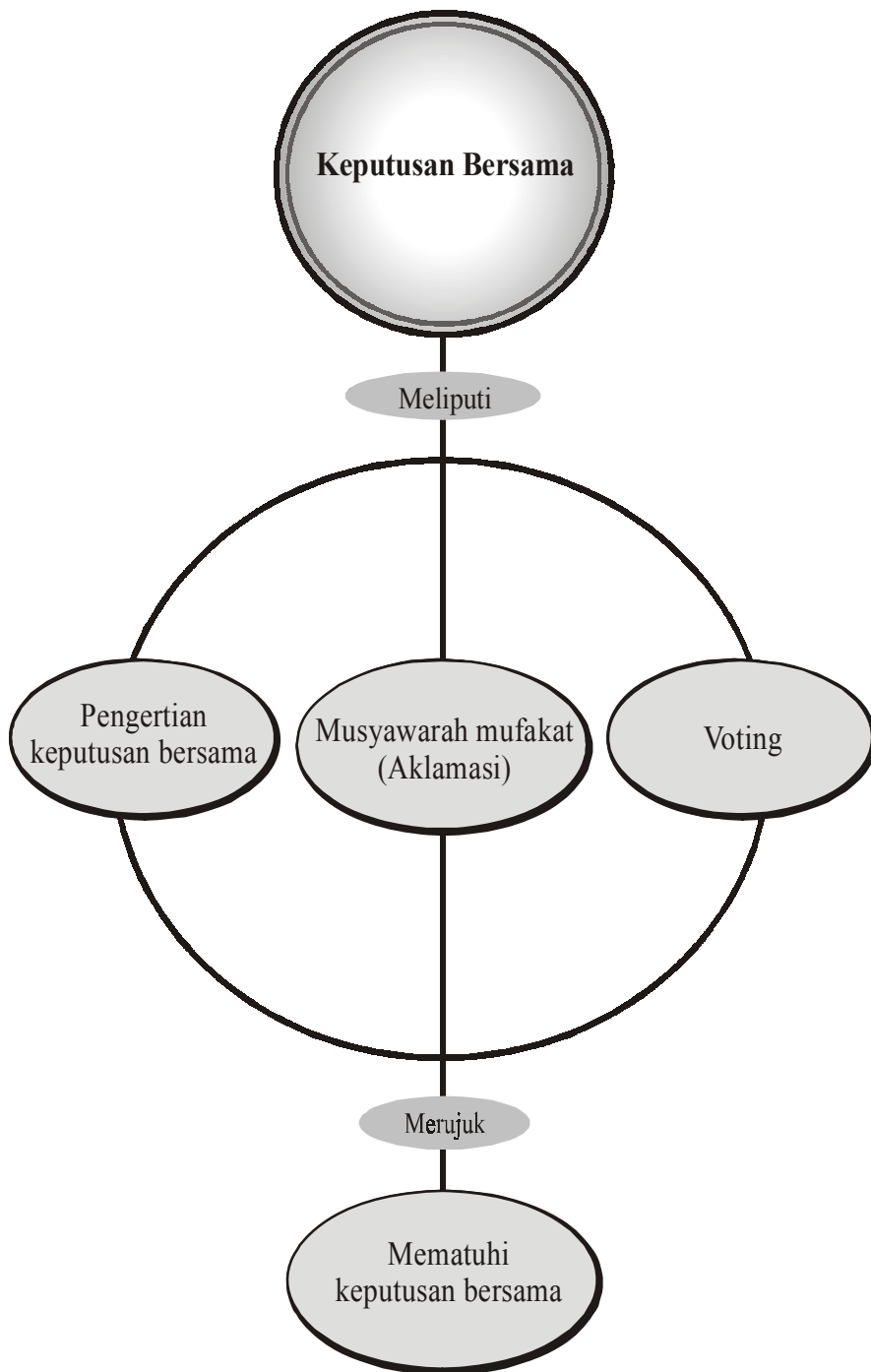


Kata Kunci

- ❖ keputusan
- ❖ aklamasi
- ❖ musyawarah
- ❖ *voting*



Peta Konsep



A. Pengertian Keputusan

Siang itu Atep tidak langsung pulang sekolah. Ia teringat akan rencana Ida dan Togar untuk mencari bahan mading di internet. Tetapi Atep belum izin ibunya untuk ikut ke warnet (warung internet).

“Bagaimana Atep, kamu jadi ikut tidak?” tanya Togar.

“Sebenarnya saya ingin ikut, tapi saya belum izin pada Ibu,” jawab Atep.

“Tenang saja Atep, kita hanya pergi sebentar, tidak lama,” jelas Ida.

“Biar nanti saya antar kamu sampai rumah,” bujuk Togar.

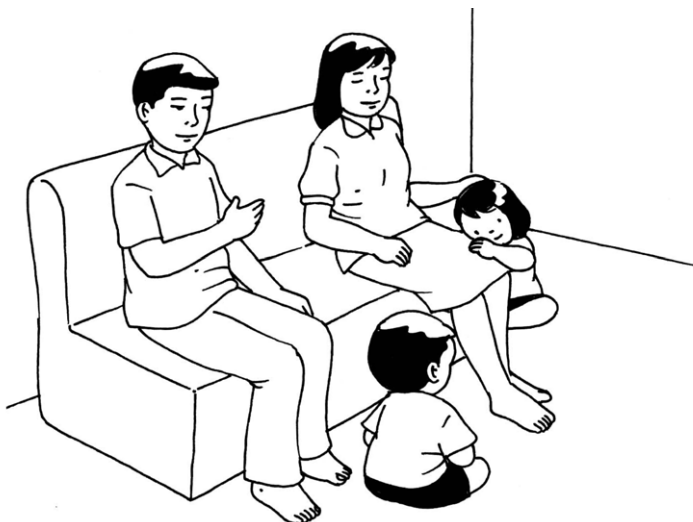
“Baiklah, saya ikut kalian,” jawab Atep.

Sebuah pilihan yang sulit bagi Atep antara mengerjakan tugas bersama teman-teman dengan meminta izin ibunya. Meskipun demikian, dengan ragu-ragu Atep memutuskan mengikuti teman-temannya.

Sementara itu ibu Atep terlihat sangat resah menunggu putranya pulang. Maklum saja, jam menunjukkan pukul 17.00 dan mendung menggantung di langit. Sudah dicoba menghubungi teman-temannya, tetapi mereka juga belum pulang. Nah, kalian tahu bukan akibat dari keputusan Atep tadi?

Oleh karena itulah dalam menentukan keputusan hendaknya jangan hanya mempertimbangkan kepentingan diri sendiri, namun juga harus mempertimbangkan orang lain agar tidak ada yang merasa dirugikan.

Sementara itu, setelah pulang dari warnet, Ida diajak orang tuanya untuk rapat keluarga.



Gambar 4.1 Rapat keluarga.

“Anak-anak, hari libur semester ini, bagaimana jika kita mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta? Bagaimana pendapat kalian?” tanya ayah Ida.

“Wah, saya setuju, Pak,” kata Okan adik Ida.

“Kalau saya ingin ke rumah nenek saja,” ibu juga turut berbicara.

“Bagaimana dengan kamu, Ida? Semua anggota keluarga ini boleh berpendapat. Kemukakan saja pendapatmu, Nak,” kata ayah Ida.

“Kalau boleh tahu, mengapa Bapak memilih Jakarta?” tanya Ida.

“Kita sekeluarga sudah lama tidak berkunjung ke rumah Paman. Nah, setelah dari TMII, kita bisa mampir, Nak,” jawab Bapak Ida.

“Benar juga, Pak. Kita lama tidak ke rumah Paman,” suara ibu meyakinkan.

“Nah, bagaimana, Ida?” tanya ayah Ida.

“Ida sebenarnya ingin sekali ke Pulau Bali. Tapi, dengan pertimbangan tersebut, Ida ikut keputusan bersama saja, yakni pergi ke TMII dan rumah paman,” jawab Ida.

“Bagus, Ida. Bapak bangga sekali. Kamu sungguh bijaksana dalam mengambil keputusan,” kata Bapak Ida.

“Pak, apakah keputusan bersama itu?” tanya Okan.

“Keputusan bersama ialah keputusan yang dibuat oleh seluruh anggota kelompok berdasarkan pemahaman dan kesadaran serta telah melalui pemikiran dan pertimbangan yang matang. Tujuannya adalah agar semua pihak tidak dirugikan dan justru menguntungkan banyak pihak,” jawab ayah Ida.



Uji Wawasan

Kerjakan soal-soal berikut di buku tugasmu.

1. Apa yang kamu ketahui tentang keputusan bersama itu?
2. Apa yang sebaiknya kalian lakukan terhadap keputusan bersama?
3. Apa yang akan terjadi jika keputusan bersama tidak dilaksanakan?

B. Bentuk-bentuk Keputusan Bersama

Pada hari Minggu yang lalu, anak-anak kelas 5 bersepakat melakukan karya wisata ke museum. Keputusan karya wisata tersebut merupakan keputusan bersama. Namun, ada seorang anak yang tidak melaksanakan keputusan tersebut.

“Badung, mengapa kemarin kamu tidak ikut Karya Wisata ke museum?” tanya Ida.

“Dari awal, bukannya saya sudah menyampaikan bahwa saya tidak setuju ke museum,” jawab Badung.

“Kamu benar, Badung. Tapi bukankah tujuan ke museum sudah disetujui teman-teman?” sambung Atep.

“Tapi, saya tetap tidak setuju. Apa asyiknya berwisata ke museum?” Badung balik bertanya.

“Badung, kamu tidak boleh egois begitu. Bukankah tujuan wisata kemarin sudah menjadi keputusan bersama? Jadi, tidak ada alasan untuk menolak. Jika sudah menjadi keputusan bersama maka semua ketentuan, ketetapan, dan penyelesaian masalah kita lakukan bersama,” tegas Togar.

“Benar, Badung. Jika sudah menjadi keputusan bersama maka kita harus menerimanya dengan ikhlas, bertanggung jawab, dan lapang dada,” tambah Ida.

“Meskipun bertentangan dengan pendapat kita?” tanya Badung.

“Tepat, Badung. Meskipun bertentangan dengan pendapat kita,” lanjut Ida.

“Mengapa harus begitu?” Badung kembali bertanya.

“Karena keputusan bersama sudah dilakukan dengan pemikiran yang matang. Tujuannya adalah agar tercipta ketenteraman dan ketertiban,” jelas Atep.

“Oh, begitu. Jadi, saya bersalah, ya?” tanya Badung.

Semua temannya hanya saling berpandangan dan tersenyum pada Badung.

Tet ... Tet ... Tet ... bel tanda dimulai pelajaran berbunyi. Pak Darma segera masuk kelas.



Gambar 4.2 Karya wisata.

“Selamat pagi, anak-anak,” sapa Pak Darma.

“Selamat pagi, Pak,” jawab anak-anak serempak.

“Oh, iya, Bapak dengar dari luar tadi anak-anak ramai berdiskusi. Kalian sedang membicarakan apa?” tanya Pak Darma.

“Iya, Pak. Kami sedang membicarakan mengenai keputusan bersama dalam karya wisata ke museum kemarin,” jawab Ida.

“Memangnya ada apa, anak-anak dengan keputusan bersama tersebut?” tanya Pak Darma

“Ini, Pak. Badung kemarin tidak melaksanakan keputusan bersama, yaitu karya wisata. Alasannya Badung berbeda pendapat,” jelas Atep.

“Oh, jadi begitu. Badung, lain kali kamu tidak boleh demikian. Semua keputusan bersama harus dilaksanakan, walaupun sebenarnya berbeda dengan keinginan kita. Kita harus lebih mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi kita. Oh, iya, anak-anak, berkaitan dengan keputusan bersama ini, apakah kalian tahu bentuk-bentuknya?” tanya Pak Darma.

Semua anak terdiam. Mereka terlihat berpikir keras. Tetapi tetap saja tidak dapat menjawab pertanyaan Pak Darma.

“Baiklah, anak-anak. Jika kalian tidak tahu, berikut akan Bapak jelaskan satu per satu. Coba dengarkan baik-baik, pinta Pak Darma.

1. Musyawarah untuk mufakat

“Musyawarah untuk mufakat adalah bentuk pengambilan keputusan melalui kesepakatan bersama (mufakat atau aklamasi). Keputusan diambil dengan suara bulat dari masing-masing peserta musyawarah,” jelas Pak Darma.

“Pak, dapatkah Bapak menyebutkan contohnya?” pinta Ida.

“Contohnya adalah pada pemilihan ketua kelas. Biasanya dalam pemilihan ketua kelas, masing-masing anak memiliki hak suara. Jadi, masing-masing anak berhak memilih calon ketua kelas sesuai dengan pilihannya masing-masing. Namun, jika semua anak memiliki pilihan yang sama dengan setuju menunjukkan salah satu anak untuk dijadikan ketua maka proses inilah yang disebut musyawarah mufakat. Dengan demikian, anak yang ditunjuk tadi langsung menjadi ketua kelas,” terang Pak Darma.

“Pak, apa saja hak-hak dalam pemilihan ketua kelas?” tanya Atep.

“Bagus sekali pertanyaanmu, Atep. Anak-anak, hak dalam pemilihan ada dua macam sebagai berikut.

- a. *Hak dipilih*, yaitu hak untuk dipilih menjadi ketua atau menjadi anggota. Masing-masing anak memiliki hak yang sama.
- b. *Hak memilih*, yaitu hak untuk memilih seseorang menjadi ketua ataupun menjadi anggota. Hak memilih ini sering disebut dengan hak suara. Satu orang memiliki satu suara. Hak suara tersebut diberikan kepada calon yang sudah dipercayainya.

2. Voting atau Pemungutan Suara

“Pak, bagaimanakah jika masing-masing punya pendapat yang berbeda, sehingga tidak tercapai mufakat?” tanya Togar dengan kritis.

“Wah, kritis sekali kamu, Togar. Dalam pengambilan keputusan bersama, jika tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah mufakat, maka jalan keluarnya adalah melalui voting (pemungutan suara). Voting yaitu pengambilan keputusan bersama dengan suara terbanyak,” jawab Pak Darma.

“Apa saja jenis-jenis voting itu, Pak?” tanya Ida.

“Voting dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- a. *Voting terbuka*, yaitu voting yang dilakukan secara terbuka, di mana para peserta menyebutkan secara langsung apa yang menjadi pilihannya.
- b. *Voting tertutup*, yaitu voting yang dilakukan secara tertutup, di mana para peserta menuliskan pilihannya pada selembar kertas,” jawab Pak Darma.

“Pak, bagaimana dengan peserta yang tidak memberikan hak suaranya?” tanya Atep.

“Peserta yang tidak memberikan hak suaranya disebut *abstain*. *Abstain* adalah tindakan tidak memberikan suaranya pada saat pemungutan suara. Tindakan *abstain*, sebenarnya tidak dilarang, namun semua peserta dianjurkan untuk memberikan suaranya,” jawab Pak Darma.

“Pak, saya sering melihat acara di televisi yang menayangkan suasana rapat di gedung DPR/MPR. Pada saat itu sering muncul istilah *interupsi*. Apakah interupsi itu?” tanya Togar.



Gambar 4.3 Interupsi dalam rapat.

“Wah, Togar, kamu kreatif sekali. Kamu mau mengamati kejadian di sekitarmu dan kamu terapkan dalam pelajaran. Jadi, interupsi berupa tindakan memotong pembicaraan pada saat rapat pengambilan keputusan. Interupsi dilakukan dengan tujuan untuk menyampaikan usul atau pendapat yang dirasa penting.

“Ada satu lagi, anak-anak. Ini berkaitan dengan kejadian sehari-hari yang perlu kalian ketahui, yakni kampanye,” tambah Pak Darma.

“Kampanye itu apa, Pak?” tanya Atep.

“Kampanye adalah kegiatan untuk mencari dukungan dari anggota. Calon pengurus menawarkan program kerja yang akan dilaksanakannya sekaligus mengajak para anggota untuk memilihnya.

Di samping itu, para calon pengurus memperkenalkan diri agar para anggota dapat mengenalnya lebih dekat,’ jawab Pak Darma.

“Bagaimana anak-anak, apakah sudah jelas semuanya?” tanya Pak Darma.

“Sudah, Pak,” jawab anak-anak serempak.

“Baiklah jika sudah jelas, silahkan kalian buat kesimpulan, catatan, dan rangkuman di buku tugas kalian,” kata Pak Darma sekaligus mengakhiri pelajaran.



Uji Wawasan

Ada dua jenis cara mengambil keputusan, yaitu mufakat (aklamasi) dan voting. Coba uraikanlah keduanya di buku tugasmu seperti tabel berikut.

No.	Aklamasi	Voting
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		



Praktik Kerja

Coba bermainlah peran (*role playing*) mengenai pemilihan ketua kelas.

1. Bentuklah kelompok yang terdiri atas 5 orang.
2. Pilihlah salah satu kegiatan berikut.
 - a. Pemilihan ketua kelas secara aklamasi.
 - b. Pemilihan ketua kelas secara voting.

3. Terapkan nilai-nilai demokrasi dengan pelaksanaan pemilihan ketua kelas secara jujur, adil, dan menghargai perbedaan pendapat.
4. Kerjakan se kreatif mungkin, sehingga antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain memiliki nilai dan aspek yang berbeda-beda.

C. Mematuhi Keputusan Bersama

Setelah pulang sekolah, Ida, Atep, dan Togar belajar bersama. Mereka belajar di rumah Ida. Mereka mengerjakan tugas dari Pak Darma untuk membuat catatan, rangkuman, dan kesimpulan pelajaran mengenai keputusan bersama.

Untuk beberapa saat, mereka terlihat sangat serius belajar. Namun sesekali diselingi dengan tanya jawab dan diskusi. Setelah kurang lebih satu jam, mereka akhirnya berhasil menyelesaikan tugasnya. Mereka tidak langsung pulang, mereka masih terlihat berbincang-bincang.

“Syukurlah, akhirnya tugas kita selesai,” kata Atep sambil menghela napas panjang.

“Iya, teman-teman. Tapi saya masih bingung,” kata Togar.

“Apa yang membuatmu bingung, Togar?” tanya Ida.

“Saya bingung, apa yang kita lakukan setelah keputusan bersama telah disepakati?” tanya Togar.

“Iya, kira-kira apa?” komentar Atep yang juga bingung.

Tiba-tiba Pak Gusti, ayahnya Ida datang. Setelah menjelaskan apa yang menjadi latar belakang kebingungannya, Ida meminta tolong pada ayahnya untuk menjelaskan.

“Baiklah, anak-anak. Akan coba Bapak bantu. Silahkan dengar dan catat baik-baik.

Jenis keputusan itu ada dua, yaitu:

1. Keputusan Pribadi

Keputusan pribadi adalah keputusan yang ditentukan oleh diri sendiri.

2. Keputusan Bersama

Keputusan bersama adalah keputusan yang ditentukan oleh beberapa orang. Biasanya keputusan bersama diambil karena dampak keputusan tersebut lebih besar dan menyangkut orang banyak.

“Apa pun jenis keputusannya, semua harus kita lakukan secara konsekuen dan bertanggung jawab. Kita harus mau melaksanakan keputusan terutama yang menyangkut keputusan bersama, walaupun sebenarnya kita berbeda pandangan dengan keputusan tersebut. Walaupun berbeda pandangan dan pendapat, kita dilarang untuk melakukan usaha-usaha pengagagalan pelaksanaan keputusan bersama. Kita harus ikhlas dan berjiwa besar,” jelas Pak Gusti panjang lebar.

“Pak, bukankah kebebasan menyampaikan pendapat sudah dijamin UUD 1945? Berarti kita bebas mengeluarkan pendapat dan bebas tidak melaksanakan kepentingan bersama karena berbeda pendapat?” tanya Togar.

“Oh, bukan begitu, Togar. Memang benar bahwa kebebasan menyampaikan pendapat di negara kita dijamin dalam UUD 1945 pasal 28 E, ayat 3.

Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Walaupun demikian, kita tidak boleh menyampaikan pendapat sesuka hati kita dan secara tidak bertanggung jawab.

Jika kita memang berbeda pendapat, hendaknya disampaikan secara sopan dan bertanggung jawab, serta apa pun keputusan bersamanya tetap harus kita laksanakan dan dukung. Sebisa mungkin kita harus menekan ego kita pribadi, dan mengutamakan kepentingan umum,” jelas Pak Gusti.

“Pak, apa akibatnya jika tidak menjalankan keputusan bersama?” tanya Atep.

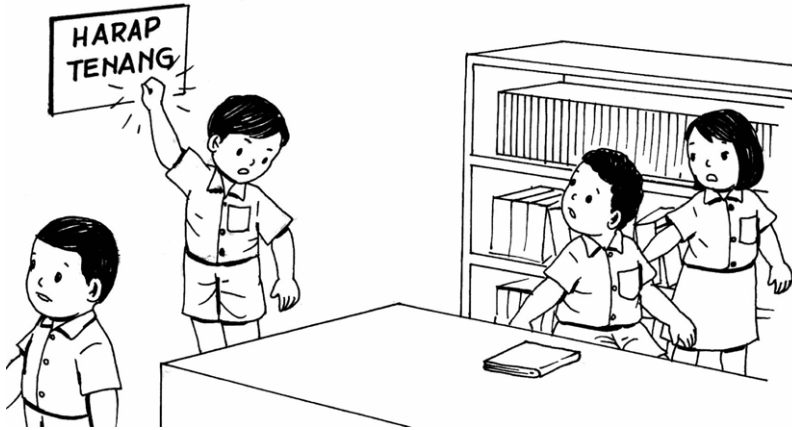
“Jika ada salah satu atau beberapa anggota yang tidak menjalankan keputusan bersama, berarti melanggar aturan yang sudah disepakati bersama, sehingga bisa merugikan orang lain,” jawab Pak Gusti.

“Bagaimana sebaiknya agar semua orang mau melaksanakan keputusan bersama, Pak?” tanya Togar.

“Sebaiknya, setiap keputusan atau peraturan harus disertai sanksi. Sanksi diperlukan agar orang berpikir dan membatalkan niatnya untuk melanggar peraturan atau keputusan bersama. Sanksi yang baik adalah yang bersifat mendidik, misalnya berikut.

1. Peraturan Sekolah

Peraturan sekolah adalah peraturan yang ada di sekolah untuk mengatur kehidupan agar tertib dan teratur. Semua warga sekolah harus menaatinya, baik itu guru maupun siswa, karena sudah disepakati bersama. Apabila melanggar, akan menerima sanksi sesuai dengan kesalahannya. Misalnya peraturan yang merupakan kesepakatan di ruang perpustakaan. Di perpustakaan dilarang berbuat gaduh. Di perpustakaan harus tenang, jika gaduh akan mengganggu pengguna perpustakaan lainnya. Adapun sanksinya adalah mendapat teguran atau bahkan dikeluarkan dari ruang perpustakaan.



Gambar 4.4 Di perpustakaan harus tenang.

2. Peraturan dalam Masyarakat

Peraturan dalam masyarakat adalah peraturan yang ada di masyarakat yang merupakan hasil dari kesepakatan bersama di antara warga masyarakat. Peraturan masyarakat bertujuan untuk mengatur kehidupan warga masyarakat agar tertib dan teratur. Peraturan dalam masyarakat biasanya dibuat dalam rapat RT, RW, atau desa/kelurahan. Misalnya, peraturan dilarang membuang sampah di sungai.



Gambar 4.5 Contoh peraturan dalam masyarakat.

3. Peraturan dalam Keluarga

Peraturan dalam keluarga merupakan hal-hal yang seharusnya dilakukan dan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan dalam keluarga. Peraturan dalam keluarga biasanya dibuat melalui rapat keluarga. Peraturan dalam keluarga bertujuan agar tercipta suasana keluarga yang harmonis. Misalnya, sebagai anak harus hormat kepada orang tua,” jelas Pak Gusti.



Gambar 4.6 Anak harus menghormati orang tua.

“Bagaimana anak-anak. Apakah sudah paham semuanya?” tanya Pak Gusti.

“Sudah, Pak,” jawab anak-anak serempak.

“Baiklah, teman-teman, kalau begitu kita akhiri belajar kelompok hari ini. Kita harus makin rajin. Sebentar lagi akan menghadapi ulangan akhir semester,” kata Atep.



Uji Wawasan

Coba jelaskan perbedaan antara keputusan pribadi dan keputusan bersama beserta pelaksanaannya. Kerjakan seperti tabel berikut.

No.	Keputusan Bersama		Keputusan Pribadi	
	Contohnya	Cara Melaksanakan	Contohnya	Cara Melaksanakan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				



Praktik Kerja

Coba amati masyarakat sekitar tempat tinggalmu. Temukan beberapa aturan yang merupakan hasil keputusan bersama. Kemudian amati dan simpulkan ketaatan warga masyarakat dalam melaksanakan keputusan tersebut. Apakah sangat taat, kurang taat, atau tidak taat? Tuliskan hasilnya dalam bentuk tabel seperti berikut. Kerjakan di buku tugasmu.

No.	Contoh Keputusan Bersama	Pelaksanaan			Keterangan
		Sangat taat	Kurang taat	Tidak taat	
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					



Rangkuman

- Keputusan bersama adalah keputusan yang dibuat oleh seluruh anggota kelompok berdasarkan pemahaman dan kesadaran, serta telah melalui pemikiran dan pertimbangan yang matang.
- Bentuk-bentuk pengambilan keputusan bersama sebagai berikut.
 - a. Musyawarah untuk mufakat (aklamasi) yaitu bentuk pengambilan keputusan bersama melalui kesepakatan bersama yang diambil dengan suara bulat dari masing-masing peserta musyawarah.
 - b. Voting yaitu pengambilan keputusan bersama berdasarkan pemungutan suara terbanyak. Voting dibedakan menjadi dua, yaitu voting terbuka dan voting tertutup.
- Abstain adalah suatu tindakan yang tidak memberikan suara pada proses pemungutan suara.
- Interupsi adalah tindakan memotong pembicaraan pada saat rapat pengambilan keputusan untuk menyampaikan usul atau pendapat yang dirasa penting.
- Kita harus menjalankan keputusan bersama dengan ikhlas dan bertanggung jawab.



Uji Kompetensi

Kerjakan soal-soal berikut di buku tugasmu.

A. Ayo, pilihlah jawaban yang benar.

1. Sikap kita terhadap keputusan bersama adalah
 - a. menolak
 - b. menerima
 - c. menentang
 - d. melaksanakan
2. Keputusan bersama kita taati karena dibuat untuk
 - a. kepentingan pribadi
 - b. kepentingan kelompok
 - c. kepentingan pimpinan
 - d. kepentingan bersama
3. Contoh keputusan pribadi ialah
 - a. membuat tata tertib
 - b. memilih pemimpin organisasi
 - c. menentukan kegiatan ekstrakurikuler
 - d. memilih tujuan kemah bersama
4. Dalam pemungutan suara, keputusan diambil berdasarkan
 - a. pilihan ketua
 - b. suara yang paling sedikit
 - c. suara terbanyak
 - d. musyawarah mufakat
5. Sebelum mengambil keputusan, sebaiknya
 - a. mempertimbangkan
 - b. sesuai keinginan pribadi
 - c. sesuai dengan kepentingan kelompok
 - d. mempertimbangkan keuntungan yang diperoleh
6. Untuk mengatur kehidupan masyarakat, maka dibuat
 - a. norma dan tata tertib
 - b. kesepakatan bersama
 - c. aturan yang bebas
 - d. aturan yang berdasarkan status sosial
7. Berikut ini adalah contoh sikap menghargai keputusan bersama, *kecuali*
 - a. melaksanakan tugas piket kelas
 - b. datang tepat waktu saat belajar kelompok
 - c. tidak bermain saat harus belajar
 - d. tidak mau dihukum saat melanggar aturan

8. Jika usul kita tidak diterima saat rapat, sikap kita adalah
 - a. marah
 - b. keluar
 - c. menerima dengan lapang dada
 - d. keluar dari anggota organisasi
9. Keputusan yang diambil bersama harus
 - a. tidak boleh melanggar hukum
 - b. boleh melanggar hukum
 - c. harus melanggar hukum
 - d. boleh melanggar hukum sedikit
10. Sikap yang perlu dipertimbangkan dalam musyawarah adalah
 - a. mau menang sendiri
 - b. mendengarkan pendapat orang lain
 - c. mengaku diri hebat
 - d. memotong pembicaraan orang lain
11. Setelah keputusan bersama diambil, langkah berikutnya adalah
 - a. mendinginkan keputusan tersebut
 - b. melaksanakan keputusan tersebut
 - c. mencari keputusan lain
 - d. mencari kekurangan keputusan tersebut
12. Usulan-usulan dari anggota dalam rapat pengambilan keputusan sebaiknya
 - a. ditampung dan dijadikan bahan pertimbangan
 - b. dicatat dan dibiarkan saja
 - c. dicari kelemahannya
 - d. anggota dilarang memberi usulan terlalu banyak.
13. Walaupun kita tidak setuju dengan pendapat orang lain, kita harus tetap
 - a. mencari kesalahan
 - b. menghormati
 - c. menolak pendapat tersebut
 - d. membenci orang tersebut
14. Peraturan perpustakaan menyebutkan “**Dilarang berbicara keras di perpustakaan**”. Apabila aturan tersebut dilanggar, yang terjadi adalah
 - a. tenang dan terkendali
 - b. ketenteraman
 - c. ramai dan kacau
 - d. tertib dan teratur
15. Apabila mempunyai usulan, kita harus
 - a. diam saja
 - b. berani menyampaikannya
 - c. menyuruh orang lain berbicara
 - d. ditulis melalui kertas

16. Pengambilan keputusan berdasarkan kesepakatan bersama disebut
 - a. pemilihan langsung
 - b. pemilihan tak langsung
 - c. pemungutan suara terbanyak
 - d. musyawarah untuk mufakat
17. Hasil keputusan bersama dilaksanakan dengan
 - a. acuh tak acuh
 - b. rasa tanggung jawab
 - c. biasa-biasa saja
 - d. apa adanya
18. Mufakat adalah
 - a. keputusan perseorangan
 - b. kesepakatan bersama
 - c. suara terbanyak
 - d. pemilihan langsung
19. Hasil keputusan harus
 - a. ditentukan oleh ketua rapat
 - b. berdasarkan keputusan perseorangan
 - c. berdasarkan keputusan golongan
 - d. diterima dan dilaksanakan peserta rapat
20. Musyawarah bersama untuk memecahkan masalah bertujuan untuk
 - a. membuka masalah
 - b. meramalkan masalah
 - c. menambah masalah
 - d. menyelesaikan masalah

B. Ayo, isilah titik-titik berikut dengan tepat di buku tugasmu.

1. Musyawarah mufakat terjadi jika semua anggota
2. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka dilakukan
3. Kebebasan mengeluarkan pendapat dalam organisasi dijamin dalam
4. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, karena
5. Setiap keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada
6. Setiap keputusan tidak boleh melanggar
7. Musyawarah bertujuan untuk
8. Dalam musyawarah biasanya dipimpin oleh
9. Hasil musyawarah harus dilaksanakan oleh
10. Musyawarah untuk mufakat, sesuai dengan Pancasila sila ke

C. Ayo, jawablah pertanyaan berikut dengan benar.

1. Apakah yang dimaksud keputusan bersama?
2. Sebutkan beberapa cara mengambil keputusan bersama.
3. Apa akibatnya apabila keputusan bersama tidak dilaksanakan?
4. Bolehkah menerima hasil keputusan tanpa melaksanakan keputusan tersebut? Jelaskan alasanmu.
5. Bagaimanakah cara menyampaikan pendapat yang baik?

ULANGAN SEMESTER 2

Kerjakan soal-soal berikut di buku tugasmu.

A. Ayo, pilihlah jawaban yang benar.

Semoga menambah pemahaman materimu.

1. Pengurus organisasi yang paling bertanggung jawab atas berjalannya kegiatan suatu organisasi adalah
 - a. ketua
 - b. wakil ketua
 - c. sekretaris
 - d. bendahara
2. Tujuan pembentukan sebuah organisasi adalah
 - a. menjadi wadah untuk belajar berorganisasi
 - b. menjadi wadah untuk berkumpul dengan teman dan sahabat
 - c. menjadi wadah menunjukkan kemampuan dan keahlian kita
 - d. menjadi wadah menghilangkan kegelisahan
3. Tugas administrasi dan tulis-menulis dalam sebuah organisasi dibebankan kepada
 - a. ketua
 - b. wakil ketua
 - c. sekretaris
 - d. bendahara
4. Organisasi yang dibentuk untuk membina remaja di lingkungan kelurahan disebut
 - a. PKK
 - b. LPMK
 - c. karang taruna
 - d. KUD
5. Salah satu manfaat jika kita menjadi anggota sebuah organisasi di sekolah adalah
 - a. menjadi anak yang terkenal
 - b. menjadi anak yang disayang guru
 - c. menjadi anak yang pemberani
 - d. menjadi anak kreatif
6. Organisasi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga disebut
 - a. PKK
 - b. LPMK
 - c. karang taruna
 - d. KUD
7. Organisasi sekolah yang bergerak di bidang kesehatan adalah
 - a. OSIS
 - b. pramuka
 - c. tim sepak bola
 - d. UKS

8. Berikut contoh organisasi yang berada di kampung, *kecuali*
 - a. karang taruna
 - b. PKK
 - c. BPD
 - d. OSIS
9. Penunjukan langsung pengurus sebuah organisasi oleh semua anggota dikenal dengan istilah
 - a. aklamasi
 - b. korupsi
 - c. interpelasi
 - d. instruksi
10. Organisasi yang berdiri untuk membantu pengembangan mutu pendidikan sebuah sekolah disebut
 - a. BPD
 - b. LPMK
 - c. komite
 - d. dewan guru
11. KUD memberikan pelayanan bagi anggotanya berupa
 - a. penjualan pupuk dengan harga yang murah dibanding harga pasaran
 - b. memberikan kredit lunak bagi para anggotanya
 - c. memberikan bunga yang tinggi bagi para peminjam
 - d. menyediakan alat-alat pertanian dan kebutuhan sehari-hari
12. Pemilihan langsung pengurus organisasi dengan suara terbanyak disebut
 - a. aklamasi
 - b. *voting*
 - c. interpelasi
 - d. instruksi
13. Memilih merupakan ... para anggota musyawarah.
 - a. hak
 - b. kewajiban
 - c. hak dan kewajiban
 - d. pilihan
14. Sebelum mengambil sebuah keputusan, sebaiknya kita
 - a. merenungkan selama berhari-hari
 - b. mendengarkan nasihat guru
 - c. mendengarkan nasihat orang tua
 - d. mempertimbangkan baik buruknya keputusan tersebut
15. Pemilihan dengan suara terbanyak yang para pemilihnya secara terbuka langsung memilih calon yang dipilih disebut dengan
 - a. *voting* terbuka
 - b. *voting* tertutup
 - c. aklamasi
 - d. interpelasi

16. Keputusan bersama harus kita taati karena dibuat untuk kepentingan
 - a. pribadi
 - b. bersama
 - c. kelompok
 - d. negara
17. Keluarga Ani mengadakan musyawarah keluarga. Ani meminta keinginannya dituruti oleh semua anggota keluarga, berarti Ani
 - a. melaksanakan keputusan bersama
 - b. memaksakan kehendak
 - c. mematuhi keputusan bersama
 - d. melaksanakan musyawarah mufakat
18. Pemilihan pengurus organisasi dilakukan oleh
 - a. anggota
 - b. keluarga
 - c. saudara
 - d. tetangga
19. Pemilihan pengurus organisasi dengan suara bulat disebut
 - a. musyawarah mufakat
 - b. suara terbanyak
 - c. *voting*
 - d. *polling*
20. Keputusan yang aspiratif adalah keputusan yang
 - a. dapat menampung semua kepentingan anggota
 - b. tidak dapat menampung kepentingan anggota
 - c. dapat menampung kepentingan pengurus
 - d. tidak dapat menampung kepentingan pengurus
21. Kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dan berkumpul diatur dalam UUD 1945 Pasal
 - a. 27
 - b. 28
 - c. 29
 - d. 31
22. Keputusan yang kita ambil harus dapat kita pertanggungjawabkan secara moral kepada
 - a. diri sendiri
 - b. orang tua
 - c. guru
 - d. Tuhan
23. Hasil keputusan bersama harus kita
 - a. terima
 - b. tolak
 - c. tentang
 - d. terima dan laksanakan

24. Untuk mengatur kehidupan di sekolah, maka dibuat
 - a. kebebasan
 - b. tata tertib
 - c. kelompok
 - d. persaingan
25. Contoh keputusan pribadi adalah
 - a. membuat tata tertib
 - b. memilih pemimpin organisasi
 - c. menentukan kegiatan ekstrakurikuler
 - d. memilih tujuan kemah bersama
26. Untuk menciptakan ketertiban, dalam masyarakat perlu dibuat
 - a. norma dan tata tertib
 - b. kesepakatan bersama
 - c. aturan yang bebas
 - d. aturan berdasarkan status sosial
27. Berikut ini adalah contoh sikap menghargai hasil keputusan bersama, *kecuali*
 - a. melaksanakan tugas piket kelas
 - b. datang tepat waktu saat belajar kelompok
 - c. tidak bermain saat harus belajar
 - d. tidak mau dihukum saat melanggar peraturan
28. Apabila ada usulan dari anggota lain yang akan memecah belah organisasi, sebaiknya kita
 - a. membela teman tersebut
 - b. mencari dukungan teman yang lain
 - c. mengimbau dan mencegah
 - d. membiarkan saja
29. Sikap yang baik jika mengikuti musyawarah adalah
 - a. menghormati kebebasan orang lain untuk berpendapat
 - b. membatasi kebebasan orang lain untuk berpendapat
 - c. melarang kebebasan orang lain untuk berpendapat
 - d. mengurangi kebebasan orang lain untuk berpendapat
30. Dalam pengambilan keputusan tidak boleh memaksakan kehendak
 - a. diri sendiri
 - b. orang lain
 - c. orang tua
 - d. teman-teman
31. Kegiatan yang tidak dilakukan oleh koperasi sekolah adalah
 - a. menjual buku-buku
 - b. menjual pakaian seragam
 - c. menjual makanan kecil
 - d. menjual pupuk dan obat-obatan

32. Organisasi yang bertugas menangani penyelenggaraan pemerintahan di sebuah desa adalah
- BPD
 - LPMK
 - PKK
 - KUD
33. Organisasi merupakan wadah untuk mengeluarkan
- emosi
 - aspirasi
 - demonstrasi
 - persaingan
34. Di bawah ini adalah contoh tugas ketua RT, *kecuali*
- memimpin rapat RT
 - memberikan surat keterangan sebagai warga RT
 - memungut gaji dari para warga
 - sebagai pengayom warga RT
35. Dalam pengambilan keputusan tidak boleh memaksakan kehendak
- diri sendiri
 - orang lain
 - orang tua
 - teman-teman
36. Sebelum pemilihan pengurus organisasi, mereka perlu memperkenalkan diri dan program kerjanya pada
- orasi
 - kampanye
 - audisi
 - kolaborasi
37. Kertas suara yang sudah dipakai dimasukkan ke dalam
- saku suara
 - buku suara
 - kotak suara
 - dompot suara
38. Laporan keputusan rapat ditulis oleh
- ketua
 - sekretaris
 - bendahara
 - anggota
39. Keputusan yang baik ialah
- berdasarkan kepentingan pribadi
 - berdasarkan kepentingan kelompok
 - berdasarkan kepentingan golongan
 - berdasarkan kepentingan umum

40. Orang yang bertugas memimpin rapat disebut
- ketua
 - sekretaris
 - bendahara
 - anggota

B. Ayo, isilah titik-titik berikut dengan jawaban yang tepat di buku tugasmu.

1. Kumpulan orang-orang yang memiliki tujuan tertentu disebut
2. Agar kegiatan organisasi bisa berjalan lancar, harus memiliki sebuah
3. Pengurus sebuah organisasi dipilih oleh
4. Tugas pokok seorang ketua dalam sebuah organisasi adalah
5. Pengurus keuangan dalam sebuah organisasi adalah
6. Organisasi yang mengurus kesehatan balita di lingkungan masyarakat disebut
7. Sikap yang baik jika keputusan bersama-sama telah disepakati adalah
8. Untuk mengatur kehidupan masyarakat kita memerlukan
9. Jika pelaksanaan mufakat gagal menghasilkan keputusan maka dilakukan
10. Sebagai seorang warga masyarakat yang baik, sudah sepantasnya kita menaati ... yang berlaku kita.
11. Hukuman dibuat untuk menghindari terjadinya ...
12. Yang berkewajiban melaksanakan tata tertib di sekolah adalah
13. Untuk mengatur ketertiban dalam sebuah masyarakat dibuatlah
14. Yang berkewajiban menaati keputusan musyawarah dalam sebuah keluarga adalah
15. Yang memimpin musyawarah dalam sebuah keluarga adalah

C. Ayo, jawablah soal berikut dengan benar.

1. Sebutkan keuntungan jika kita mengikuti organisasi.
2. Apa yang harus kita lakukan jika kita diberi tugas dalam sebuah kegiatan organisasi?
3. Sebutkan contoh organisasi kemasyarakatan yang ada di daerahmu.
4. Apakah yang kamu ketahui tentang aklamasi dan voting?
5. Mengapa keputusan bersama harus kita taati dan laksanakan?



Daftar Pustaka

- Ichlasul, Amal dan Armaidly Armani. 1996. *Keterbukaan Informasi dan Ketahanan Nasional*. Jogjakarta : Gajah Mada University Press.
- Ichlasul, Amal dan Armaidly Armani. 1998. *Sumbangan Ilmu Sosial terhadap Konsepsi Ketahanan Nasional*. Jogjakarta : UGM Press.
- Morissan. 2005. *Hukum Tata Negara RI, Era Reformasi*. Jakarta : Ramdina Prakarsa.
- Pontoh, Coen Husain. 2003. *Akhir Globalisasi : Dari Perdebatan Teori Menuju Gerakan Massa*. Jakarta : C-Books.
- Riani, Asri Laksmi, MS., dkk. 2006. *Dasar-Dasar Kewirausahaan*. Surakarta : UNS Press.
- _____, 2003. *Buku Putih Pertahanan*. Jakarta : Dephan.
- _____, 1996. *Kebebasan dan Globalisasi : Kumpulan Tulisan dari Seminar-Seminar IKALUNTAG*. Jakarta : Yayasan Sumber Agung.
- _____, 2005. *Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta : Pressindo.
- _____, 2004. *Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen*. Jakarta : Kawan Pustaka.
- _____, 2005. *Undang-Undang Perjanjian Internasional dan Undang-Undang Luar Negeri beserta Peraturan Pelaksanaannya*. Jakarta : Harvarindo



Glosarium

- Agenda* : acara yang akan dibicarakan dalam rapat.
- Anarki* : kekacauan (di suatu negara).
- Arsip* : dokumen tertulis, lisan, gambar dari waktu yang telah lalu dan disimpan serta dipelihara untuk referensi.
- Bakat* : dasar kepandaian/sifat yang dibawa sejak lahir.
- Demokrasi* : sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantara wakilnya.
- Demonstrasi* : pernyataan protes secara massal.
- Eksplotasi* : pen-dayagunaan, pemanfaatan.
- Eksplorasi* : penjelajahan lapangan dengan tujuan memperoleh pengetahuan lebih (terutama sumber daya alam) di tempat tersebut.
- Harmonis* : berjalan baik dan serasi.
- Hierarki* : urutan tingkatan/jenjang jabatan (pangkat kedudukan).
- Independen* : tidak terikat/berdiri sendiri.
- Inovasi* : penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada baik tentang gagasan, alat, metode.
- Instansi* : badan pemerintah umum/kantor.
- Jurnalistik* : hal yang menyangkut wartawan/persurat-kabaran.
- Klaim* : tuntutan pengakuan atas suatu fakta bahwa seseorang berhak memiliki sesuatu.
- Konvensi* : pemufakatan/kesepakatan.
- Koordinasi* : mengatur suatu organisasi/kegiatan sehingga peraturan/tindakan yang dilakukan tidak saling bertentangan/simpang siur.
- Kreativitas* : kemampuan untuk mencipta/daya cipta.
- Minat* : kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu.
- Oknum* : orang perseorangan.
- Organisasi* : sebuah tempat/wadah berkumpulnya 2 orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.
- Otoriter* : sewenang-wenang.
- Pesimis* : mudah putus asa.
- Potensi* : kemampuan yang dapat dikembangkan.
- Serikat* : perkumpulan, perhimpunan, gabungan.
- Supervisi* : pengawasan.
- Wartawan* : orang yang pekerjaannya mencari/menyusun berita untuk dimuat di surat kabar, majalah.



ISBN 978-979-068-082-1 (no. jilid lengkap)
ISBN 978-979-068-092-0

Buku ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan telah dinyatakan layak sebagai buku teks pelajaran berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2008 Tanggal 7 November 2008 tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digunakan dalam Proses Pembelajaran.

Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp5.595,--